



UPSUS SIWAB

LAPORAN KINERJA 2017

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian



Kata Pengantar



Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2017.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja mencakup ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sekaligus sebagai pertanggung jawaban kepada publik atas penyelenggaraan fungsi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan untuk terwujudnya *Good Governance*.

Jakarta, Februari 2018

Direktur Jenderal

Ketut Diarmita

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
EXECUTIVE SUMMARY	vi
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	4
1.4. Sumber Daya Manusia	10
1.5. Dukungan Anggaran	11
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis (Renstra)	12
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	18
2.3. Perjanjian Kinerja.....	19
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran.....	21
3.2. Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2017	21
3.3. Kinerja Lainnya	52
3.4. Akuntabilitas Keuangan.....	52
IV. PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Anggaran Ditjen PKH Tahun 2017	11
Tabel 2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
Tabel 3	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	14
Tabel 4	Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2019	19
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2017	20
Tabel 6	Capaian Sasaran Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017	22
Tabel 7	Produksi Telur Tahun 2016-2017	35
Tabel 8	Rincian Jumlah SKLB per Jenis Ternak Tahun 2017	39
Tabel 9	Realisasi dan Pertumbuhan Volume Ekspor 10 Komoditas Ekspor Terbesar Tahun 2012 – 2017	40
Tabel 10	Investasi Sub Sektor Peternakan, 2012-2017	44
Tabel 11	Posisi Indonesia pada Global Competitiveness Index, 2012-2017	45
Tabel 12	Ease of doing business index, 2011-2017	46
Tabel 13	Pagu dan Realisasi Anggaran per Kewenangan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017	54
Tabel 14	Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017	55
Tabel 15	Pagu dan Realisasi Anggaran per Kegiatan Utama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Nilai Kinerja Program Pembangunan PKH Tahun 2017	27
Gambar 2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak Tahun 2017.....	27
Gambar 3	Produksi Daging Sapi dan Kerbau serta Peningkatannya Tahun 2013-2017	28
Gambar 4	Populasi Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2013-2017	29
Gambar 5	Capaian Upsus Siwab Tahun 2017	30
Gambar 6	Capaian Produksi Daging Ternak Lainnya Tahun 2017	34
Gambar 7	Trend Produksi Telur Tahun 2013-2017	35
Gambar 8	Perkembangan Harga Komoditas Telur Ayam Ras Di Tingkat Produsen Sampai Minggu Ke I November 2017	36
Gambar 9	Produksi Susu Tahun 2013-2017	37
Gambar 10	Realisasi dan Pertumbuhan Volume Ekspor, 2012 – 2017	41
Gambar 11	Investasi PMA Sub Sektor Peternakan Berdasarkan Negara Tahun 2017	42
Gambar 12	Angka Status Kesehatan Hewan Per Provinsi Tahun 2017	47
Gambar 13	PDB Sub Sektor Peternakan per Tenaga Kerja Tahun 2013-2017	50
Gambar 14	Nilai NTP Peternakan Tahun 2013-2017	51
Gambar 15	Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2012-2017	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Permentan Nomor 43 Tahun 2015)	60
Lampiran 2	Rekapitulasi SDM Ditjen PKH berdasarkan pendidikan terakhir Tahun 2010-2017.....	63
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2017.....	64
Lampiran 4	Tabel Produksi Daging, Telur, dan Susu	66
Lampiran 5	Nilai Efisiensi Masing-Masing Nilai Kinerja	77
Lampiran 6	Contoh SKLB	78
Lampiran 7	Realisasi Investasi PMDN berdasarkan Sub Sektor Tahun 2012-2017	79
Lampiran 8	Data unit usaha yang sudah memiliki NKV	80
Lampiran 9	PDB Peternakan Tahun 2017	81
Lampiran 10	Nilai Tukar Petani Peternakan Tahun 2017	82

EXECUTIVE SUMMARY

Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019 telah memasuki tahun ketiga. Tantangan untuk mencapai pertumbuhan domestik bruto bidang peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan Investasi, ekspor produk peternakan, dan peningkatan kesejahteraan peternak yang diukur melalui nilai tukar peternak terus diupayakan. Upaya yang dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik pendekatan yang bersifat regulasi/kebijakan/pengaturan maupun pendekatan belanja pemerintah (APBN). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun kebijakan di bidang produksi ternak dan pengembangan ternak.

Untuk itu Ditjen PKH mewujudkannya dalam bentuk program yaitu “Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat”, dengan tiga sasaran strategis yaitu: (1) meningkatkan produksi pangan hewani asal ternak; (2) meningkatkan nilai tambah dan daya saing peternakan; dan (3) meningkatkan kesejahteraan peternak, dengan dua belas indikator yaitu (1) produksi daging sapi/kerbau; (2) produksi daging ternak lainnya; (3) produksi telur; (4) produksi susu; (5) ternak bersertifikat/SKLB; (6) volume ekspor komoditi peternakan; (7) investasi subsektor peternakan PMA; (8) investasi subsektor peternakan PMDN; (9) status kesehatan hewan; (10) persyaratan mutu dan keamanan produk hewan; (11) PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan; dan (12) Nilai Tukar Peternak (NTP). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Jenderal Peternakan dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparant, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Capaian sasaran strategis Ditjen PKH pada tahun 2017 termasuk kategori berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian sasaran strategis enam indikator yang rata-rata lebih dari 100%, dengan kisaran 59,57-1.155%. Dari dua belas indikator kinerja, terdapat enam indikator kinerja yang capaiannya sangat berhasil (capaian >100%) yaitu Produksi Susu, Ternak bersertifikat /SKLB, Volume ekspor komoditi peternakan, Investasi subsektor peternakan PMA, Investasi subsektor peternakan PMDN, dan Status kesehatan hewan. Sedangkan indikator kinerja yang kurang berhasil (capaian <60%) adalah produksi telur.

APBN 2017 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.1,729 triliun. Pada bulan Agustus 2017, Ditjen PKH mendapat tambahan anggaran melalui APBN-P Rp. 222,400 Milyar yang dialokasikan untuk kegiatan: (1) penguatan sarana dan prasarana hijauan pakan ternak, alat dan mesin; (2) produksi benih (Embrio Ternak Sapi Belgian Blue); (3) Pengembangan Ternak Sapi dan Kambing UPTD Provinsi; (4) Optimalisasi Reproduksi (Sinkronisasi Hormon); dan (5) Pengendalian Penyakit Hewan. Jadi pada triwulan III, total anggaran Ditjen PKH menjadi Rp.1,880 T. Dari total anggaran tersebut besarnya alokasi dana untuk kantor pusat sebesar Rp. 225,72 miliar (11,96%), kantor daerah sebesar Rp.789,43 miliar (41,82%), Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.856,10 miliar (45,35%), Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota sebesar Rp.16,39 miliar (0,87%). Dana tersebut dialokasikan pada 60 satker dengan rincian 1 Satker Pusat, 22 Satker UPT, 34 Satker Tugas Pembantuan Provinsi, dan 3 Satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

Realisasi anggaran Ditjen PKH pada tahun 2017 sebesar Rp 1,66 triliun atau 88,18% dari pagu Rp 1,89 triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, terjadi peningkatan realisasi anggaran yang cukup tinggi pada tahun 2017 sebesar 22,93%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 terjadi pemblokiran anggaran sebesar Rp 570,25 miliar. Realisasi anggaran yang masih 88,18% disebabkan oleh beberapa kegiatan pengadaan HPT, sapi potong, dan pembayaran biaya operasional Upsus Siwab yang tidak terealisasi. Selain itu juga terjadi penurunan realisasi pada belanja pegawai yang disebabkan banyaknya pegawai yang pensiun pada tahun 2017.

Rencana kerja tahun 2018 adalah melanjutkan upaya khusus peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau, pengadaan sapi indukan (impor), pengamanan penyakit hewan, penyelamatan betina produktif, pengelolaan pakan hijauan, produksi pakan olahan, peningkatan mutu dan keamanan pakan, produksi vaksin dan obat hewan, produksi benih (semen dan embrio), produksi bibit unggul ternak, dan pengawasan keamanan produk hewan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun kebijakan di bidang produksi ternak dan pengembangan ternak dengan fungsi mencakup kebijakan di bidang perbibitan dan produksi, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat diukur dari sisi makro ekonomi dan sisi teknis peternakan dan kesehatan hewan. Makro ekonomi terkait dengan kinerja produk domestik bruto peternakan, investasi baik PMDN maupun PMA, dan kesejahteraan peternak. Sedangkan dari teknis peternakan dan kesehatan hewan dikaitkan dengan produksi dan populasi ternak.

Dari kinerja makro ekonomi, menunjukkan bahwa untuk Produk Domestik Bruto (PDB) peternakan selama lima tahun (2010-2015) atas dasar harga konstan telah tumbuh 4,67% per tahun. Pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan, lebih tinggi dari pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti sempit) yang hanya sebesar 4,26%. Pertumbuhan sub sektor peternakan selama kurun waktu 2009-2013 merupakan pertumbuhan tertinggi diantara sub sektor lainnya di lingkup pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sub sektor peternakan berpeluang sebagai sumber pertumbuhan baru sektor pertanian. Investasi baik PMDN maupun PMA relatif masih kecil yaitu kurang dari 1% secara nasional kurun waktu 2010-2015. Investasi didominasi oleh sektor perunggasan yaitu untuk PMDN sebesar 78,69% dan PMA sebesar 73,09%. Sedangkan untuk investasi lainnya yaitu peternakan sapi dan kerbau meningkat sebesar 5,6%, peternakan lainnya sebesar 13,19% untuk PMDN dan PMA peternakan sapi dan kerbau sebesar 8,80%, peternakan lainnya sebesar 14,66%.

Dalam rentang waktu 5 tahun (2010-2015) pertumbuhan populasi ternak besar rata-rata mengalami kenaikan, kecuali kerbau mengalami penurunan yaitu : sapi potong 4,28%, sapi perah 3,41%, kuda 0,76% dan kerbau (6,54%), sedangkan pertumbuhan populasi ternak kecil meningkat yaitu: kambing 3,43%, domba 12,15%, dan babi 1,14%. Pertumbuhan populasi ternak unggas dan aneka ternak rata-rata meningkat, masing-masing sebesar: ayam buras 2,67%, ayam ras petelur 10,29%, ayam ras pedaging 11,57%, itik 8,50%, kelinci 25,07%, dan itik manila mencapai 14,84%. Untuk ternak unggas lainnya, seperti kelinci, burung puyuh, dan merpati meningkat signifikan masing-masing sebesar 8,84%; 20,89 dan 54,26%.

Dalam kurun waktu 5 tahun produksi daging dan telur nasional meningkat, sedangkan produksi susu turun sebesar 2,65%. Produksi daging nasional meningkat sebesar 5,48% yang berasal dari kontribusi hampir seluruh komoditi, kecuali kambing dan domba yang turun masing-masing sebesar 1,34% dan 0,56%. Sedangkan produksi telur meningkat sebesar 6,21%.

Selain itu Ditjen PKH masih menghadapi tantangan terkait : 1) Kelembagaan (efektifitas kemitraan, peran koperasi, dukungan perbankan & asuransi; 2) Konsistensi kebijakan dan instrumentasi kebijakan; 3) Kemampuan SDM; 4) Infrastruktur (kualitas RPH, sarana transportasi); 5) Persaingan dan liberalisasi pasar; 6) Ketergantungan sarana produksi dari impor; 7) Penyakit eksotik; 8) Persaingan dalam penggunaan lahan dan alih fungsi lahan.

Untuk menjawab tantangan tersebut di atas Ditjen PKH mewujudkannya dalam bentuk program yaitu "Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat". Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Jenderal Peternakan dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparant, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2017 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :1) perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :1) perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan

pemasaran hasil peternakan; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Masing-masing unit organisasi tersebut diatas mempunyai tugas dan fungsi :

- (1) Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta produksi ternak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi :
 - (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
 - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;

- (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
 - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
 - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; dan
 - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
- (2) Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi pakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pakan menyelenggarakan fungsi :
- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;

- (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; dan
 - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan.
- (3) Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyehatan hewan secara individu dan populasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; dan
 - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.

- (4) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat veteriner. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
 - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
 - (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
 - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
 - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; dan
 - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
 - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
 - (c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
 - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
 - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; dan
 - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (6) Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :
- (a) koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - (b) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - (c) evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - (d) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- (e) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Selengkapnya Struktur Organisasi Ditjen PKH Tahun 2017 disajikan pada Lampiran 1.

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Jumlah SDM Ditjen PKH tahun 2017 sebanyak 2.064 orang, yang terdiri dari:

- 1 Jumlah pegawai menurut Eselon II: Sekretariat Direktorat Jenderal 146 orang, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak 65 orang, Direktorat Pakan 54 orang, Direktorat Kesehatan Hewan 68 orang, Direktorat Kesmavet 46 orang, dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 49 orang
- 2 Jumlah pegawai pusat dan UPT: Pegawai pusat 382 orang, sedangkan pegawai UPT 1.682 orang
- 3 Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV 225 orang, golongan III 1.293 orang, golongan II 511 orang dan golongan I 35 orang
- 4 Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 19 orang, S-2 sebanyak 471 orang, S-1/D-4 sebanyak 490 orang, Sarjana Muda/D3/D2 sebanyak 212 orang, SLTA sebanyak 721 orang, SLTP sebanyak 63 orang, dan SD sebanyak 83 orang.
- 5 Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: Laki-laki sebanyak 1.308 orang dan perempuan sebanyak 756 orang.

Selengkapnya data pegawai Ditjen PKH disajikan pada Lampiran 2.

1.5 Dukungan Anggaran

APBN PKH tahun 2017 awalnya sebesar Rp 1,729 Triliun, pada bulan Agustus Ditjen PKH mendapat APBN-P sebesar Rp 222,40 Miliar, sehingga total anggaran sebesar Rp 1,88 Triliun. Berdasarkan kewenangan, bobot terbesar anggaran PKH terdapat pada TP Provinsi sebesar Rp 861,793 miliar (45,82%), sedangkan berdasarkan jenis belanja bobot terbesar pada Belanja Barang sebesar Rp 1,569 Triliun (83,47%), dan berdasarkan jenis kegiatan utama bobot terbesar pada Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serts Peningkatan Produksi Pakan Ternak sebesar Rp 945,654 Miliar (50,29%).

Tabel 1 Anggaran Ditjen PKH Tahun 2017

(Rp Miliar)

No	Kewenangan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
1	Kantor Pusat	36.688	185.642	5.493	221.823
2	Kantor Daerah	112.237	506.524	161.760	780.521
3	Tugas Pembantuan Propinsi	0	861.793	0	861.793
4	Tugas Pembantuan Kabupaten	0	16.394		16.394
	Total	142.925	1.570.353	167.254	1.880.532

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra)

Dalam melaksanakan visi dan misinya pada tahun 2017, Ditjen PKH telah mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PKH Tahun 2015-2019, yang telah mengalami revisi pada tahun 2016 menyesuaikan perubahan Renstra Kementerian Pertanian.

Visi

Visi Ditjen PKH dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak”

Misi

Menjabarkan dari Visi yang ditetapkan, Ditjen PKH akan mengemban Misi:

1. Mewujudkan ketahanan pangan asal ternak;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak;
3. Mengembangkan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, adalah:

1. Meningkatkan produksi ternak;
2. Meningkatkan kualitas komoditas ternak;
3. Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor;

4. Meningkatkan status kesehatan hewan;
5. Meningkatkan investasi peternakan;
6. Meningkatkan kesejahteraan peternak

Untuk mengukur tujuan yang akan dicapai maka ditetapkanlah indikator tujuan Ditjen PKH tahun 2015-2019 yang disampaikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Tujuan Ditjen PKH

Tujuan		Indikator Tujuan	Satuan	2019
a.	Meningkatkan produksi ternak	Produksi daging	Ribu ton	4.922,51
		Produksi telur	Ribu ton	3.770,00
		Produksi susu	Ribu ton	1.063,56
b.	Meningkatkan kualitas komoditas ternak	Ternak yang bersertifikat/SKLB	Ekor	3.730
c.	Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor	Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan	Persen	88,16
		Volume ekspor komoditi peternakan	Persen	6
d.	Meningkatkan status kesehatan hewan	Status kesehatan hewan	Persen	80
e.	Meningkatkan investasi peternakan	Investasi sub sektor peternakan PMA	Persen	2,5
		Investasi sub sektor peternakan PMDN	Persen	3
f.	Meningkatkan kesejahteraan peternak	Index Nilai Tukar Peternak	Index	108,12
		PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan	Rp Juta	44,17

Sumber: Renstra Ditjen PKH Tahun 2015-2019 Rev II

Sasaran

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi pangan asal hewan, daya saing dan pendapatan peternak. Masing-masing sasaran tersebut mempunyai

indikator yang ingin dicapai selama kurun waktu 2015-2019 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Adapun IKSP tersebut disampaikan pada Tabel 3

Tabel 3. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target (th)				
1	Meningkatkan produksi pangan hewani asal ternak	a.	Produksi daging sapi kerbau (000 ton)	588,56	639,61	694,96	755,04
		b.	Produksi daging ternak lainnya (000 ton)	3.678,67	3.796,88	3.969,57	4.167,51
		c.	Produksi telur (000 ton)	3.393,36	3.536,86	3.655	3.770
		d.	Produksi susu (000 ton)	850,77	910,57	980,88	1.063,56
2	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing peternakan	e.	Ternak yang bersertifikat / SKLB (ekor)	10.880	2.950	3.245	3.730
		f.	Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan (%)	63,33	72,76	80,37	88,16
		g.	Volume ekspor komoditi peternakan (%)	3	4	5	6
		h.	Status kesehatan hewan (%)	73	76	78	80
		i.	Investasi sub sektor peternakan PMA (%)	1	2	2	2,5
			Investasi sub sektor peternakan PMDN (%)	1	2	2,5	3
3	Meningkatkan kesejahteraan peternak	j.	PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan (Rp Juta)	37,14	39,49	41,83	44,17
		h.	Nilai Tukar Peternak (NTP)	107,23	107,53	107,82	108,12

Sumber: Renstra Ditjen PKH Tahun 2015-2019 Rev II

Kebijakan dan Strategi

1. Arah dan Kebijakan

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyesuaikan dengan Kementerian Pertanian. Dalam arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian tersebut telah ditetapkan kebijakan untuk peternakan dan kesehatan hewan yaitu :

a. Percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya peternakan. Arah kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah operasional peningkatan produksi daging melalui:

- 1) Peningkatan perbibitan dan produksi ternak;
- 2) Pengembangan pakan ternak;
- 3) Kesehatan hewan;
- 4) Dukungan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan;
- 5) Dukungan manajemen kesekretariatan

b. Peningkatan komoditas peternakan bernilai tambah dan berdaya saing. Kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah operasional berupa peningkatan komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing melalui:

- 1) Peningkatan perbibitan dan produksi ternak
- 2) Pengembangan pakan ternak
- 3) Kesehatan hewan
- 4) Pengolahan dan pemasaran hasil ternak
- 5) Penjaminan pangan asal hewan ternak
- 6) Dukungan manajemen kesekretariatan

2. Strategi

Dalam peta strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah disesuaikan dengan strategi Kementerian Pertanian, sehingga Strategi Ditjen Peternakan dan Kesehatan hewan terkait dengan strategi:

- a. Mendorong peningkatan konsumsi pangan berbasis produksi lokal
- b. Peningkatan komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing
- c. Penyediaan bahan baku bio industri dan bio energi
- d. Peningkatan pendapatan keluarga petani
- e. Peningkatan kualitas petani dan kelembagaannya
- f. Peningkatan kualitas aparatur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Program dan Kegiatan

1. Program

Dengan melihat kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2015 –2019 maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah merumuskan programnya yaitu :

**“Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat”**

Arah program mengarah pada 2 (dua) kata kunci dalam program tersebut, yaitu: kata kunci pertama, pemenuhan pangan asal ternak yang mengarah pada pencapaian peningkatan populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu). Kata kunci kedua adalah agribisnis peternakan rakyat yang mengarah pada peningkatan daya saing peternakan dan kesehatan hewan.

2. Kegiatan

Untuk mencapai Sasaran Program yaitu meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak, daya saing dan pendapatan peternak dalam mendukung terwujudnya 3 Sasaran Strategis Kementan yang terkait dengan Ditjen Peternakan dan Keswan, diperlukan langkah operasional sebagai berikut:

- a. Peningkatan perbibitan dan produksi ternak (produktivitas), akan ditempuh dengan kegiatan/langkah operasional yaitu:
 - 1) Pengembangan populasi sapi dan kerbau
 - 2) Produksi benih sapi dan kerbau
 - 3) Pengembangan populasi kambing dan domba
 - 4) Pengembangan populasi babi
 - 5) Pengembangan populasi unggas dan aneka ternak
 - 6) Peningkatan produktivitas ternak sapi dan kerbau
 - 7) Penambahan indukan dan pejantan sapi
- b. Peningkatan produksi mutu dan keamanan pakan ternak akan ditempuh langkah operasional:
 - 1) Pengembangan hijauan pakan ternak
 - 2) Pengembangan pakan olahan dan bahan pakan
 - 3) Pengembangan mutu dan keamanan pakan
- c. Peningkatan status kesehatan hewan akan ditempuh langkah operasional:
 - 1) Penanganan dan pengendalian PHMSZ
 - 2) Penanganan dan pengendalian penyakit Anthraks
 - 3) Penanganan dan Pengendalian Rabies
 - 4) Penurunan angka kematian ternak
 - 5) Peningkatan kesehatan hewan pemasukan dan pengeluaran
 - 6) Peningkatan mutu dan keamanan bahan pakan asal hewan
 - 7) Peningkatan volume ekspor obat hewan

- d. Peningkatan mutu dan keamanan produk hewan akan ditempuh langkah operasional:
 - 1) Peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH
 - 2) Penerapan kesejahteraan hewan
 - 3) Pencegahan penularan zoonosis
- e. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan akan ditempuh langkah operasional:
 - 1) Peningkatan fasilitasi UPH peternakan pangan dan non pangan
 - 2) Peningkatan fasilitasi pengolahan biogas, kompos, dan pupuk cair
 - 3) Peningkatan volume ekspor komoditi peternakan
 - 4) Perbaikan tata niaga peternakan
 - 5) Peningkatan investasi sub sektor peternakan
 - 6) Peningkatan aksesibilitas pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan
 - 7) Penguatan kelembagaan peternakan
- f. Peningkatan akuntabilitas akan ditempuh langkah operasional
 - 1) Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya
 - 2) Peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP

2.2 Indikator Kinerja Utama

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8543/Kpts/RC.010/F/10/2016. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015-2019. Indikator Kinerja Utama Ditjen PKH Tahun 2016-2019 disajikan pada Tabel 4

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target (tahun)			
			2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatkan Produksi Pangan Hewani Asal Ternak	a. Produksi daging sapi kerbau (000 ton)	588,56	639,61	694,96	755,04
		b. Produksi daging ternak lainnya (000 ton)	3.678,87	3.796,88	3.969,57	4.167,51
		c. Produksi telur (000 ton)	3.393,36	3.536,86	3.655	3.770
		d. Produksi susu (000 ton)	850,77	910,57	980,88	1.063,56
2.	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Peternakan	e. Ternak yang bersertifikat/SKLB (ekor)	10.880	2.950	3.245	3.730
		f. Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan (%)	63,33	69,18	76,83	84,53
		g. Volume ekspor ternak dan produk hewan (%)	3	4	5	6
		h. Status kesehatan hewan (%)	73	76	78	80
		i. Investasi sub sektor peternakan PMA (%)	1	2	2	2,5
		Investasi sub sektor peternakan (PMDN) (%)	1	2	2,5	3
3.	Meningkatkan Kesejahteraan Peternakan	j. PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan (Rp. Juta)	37,14	39,49	41,83	44,17
		k. Nilai Tukar Peternak (NTP)	107,23	107,53	107,82	108,12

2.3 Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2017 Direktur Jenderal PKH menyepakati perjanjian kinerja dengan 11 indikator yang ingin dicapai yaitu: (1) Produksi daging sapi/kerbau; (2) produksi ternak lainnya; (3) produksi telur; (4) produksi susu; (5) ternak bersertifikat/SKLB; (6) volume ekspor komoditi peternakan; (7) investasi subsektor peternakan PMA dan Investasi sub sektor peternakan PMDN; (8) status kesehatan hewan; (9) persyaratan mutu dan keamanan produk hewan; (10) PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan; (11) Nilai Tukar Petani Peternak (NTP). Selengkapnya target indikator kinerja perjanjian kinerja Dirjen PKH Tahun 2017 disajikan pada Tabel 5

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2017

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	1) Produksi daging sapi/kerbau	639,61 Ribu Ton
		2) Produksi daging ternak lainnya	3.796,88 Ribu Ton
		3) Produksi telur	3.536,86 Ribu Ton
		4) Produksi Susu	910,57 Ribu Ton
2	Peningkatan Daya Saing Peternakan	1) Ternak bersertifikat/SKLB	2.950 Ekor
		2) Volume ekspor komoditi peternakan	4 %
		3) Investasi subsektor peternakan PMA	2 %
		Investasi subsektor peternakan PMDN	2 %
		4) Status kesehatan hewan	76 %
		5) Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan	72,76 %
3	Peningkatan Kesejahteraan Peternak	1) PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan	39,49 Rp Juta
		2) Nilai Tukar Peternak (NTP)	107,53

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Menteri Pertanian Tahun 2017 disampaikan pada Lampiran 3.

Untuk mencapai sasaran program tersebut, pada tahun 2017 Ditjen PKH melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran pemenuhan pangan asal ternak

No	Indikator/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Target Output
Produksi Daging Sapi dan Kerbau			
1	Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT (Ha)	9.119.784.000	752
2	Pengembangan Kebun HPT di UPT (Ha)	11.989.791.000	511
3	Sarana Pengembangan Pakan dan HPT di UPT (Unit)	3.067.900.000	183
4	Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas (Stek)	112.399.593.000	98.873.476
5	Penguatan Pakan Tambahan untuk Ternak Gangguan Reproduksi (Ton)	19.891.360.000	3.157
6	Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT (Ton)	37.754.611.000	7.774
7	Pengujian Mutu Pakan dan Sertifikasi Pakan (Sampel)	1.126.311.000	2.000
8	Penguatan Sarana dan Prasarana Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Sapi Potong (Paket)	4.398.400.000	3
9	Pengembangan Populasi Sapi Potong (Klp)	40.947.907.000	149
10	Pengembangan Populasi Kerbau (Klp)	1.464.200.000	5
11	Optimalisasi Reproduksi (Ekor)	622.422.375.000	4.000.000
12	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Potong (Ekor)	22.485.809.000	2.189
13	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Kerbau (Ekor)	1.456.508.000	373
14	Peningkatan Kualitas Semen Beku (Dosis)	9.386.494.000	2.200.000
15	Peningkatan Kualitas Semen Beku (BLU) (Dosis)	11.028.000.000	2.375.000
16	Peningkatan Produksi Embrio Ternak (Embrio)	2.628.810.000	800
17	Fasilitasi Bangunan RPH (Unit)	10.252.800.000	3
18	Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif (Lokasi)	30.729.408.000	40
Produksi Daging Ternak Lainnya			
1	Pengembangan Populasi Kambing (Klp)	430.000.000	2
2	Pengembangan Populasi Domba (Klp)	577.150.000	3
3	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Kambing (Ekor)	725.638.000	1.150
4	Pengembangan Populasi Babi (Klp)	1.425.875.000	10
5	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Babi (Ekor)	278.100.000	730
6	Pengembangan Populasi Itik (Klp)	756.200.000	25
7	Pengembangan Populasi Ayam Lokal (Klp)	7.940.628.000	275
8	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Ayam (Ekor)	1.717.586.000	190.100
9	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Itik (Ekor)	694.106.000	413.889
Produksi Telur			
1	Pengembangan Populasi Itik (Klp)	756.200.000	25
2	Pengembangan Populasi Ayam Lokal (Klp)	7.940.628.000	275
3	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Ayam (Ekor)	1.717.586.000	190.100
4	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Itik (Ekor)	694.106.000	413.889

Produksi Susu			
1	Pengembangan Populasi Sapi Perah (Klp)	3.945.520.000	9
2	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Perah (Ekor)	2.529.995.000	1.350

2. Sasaran Peningkatan Daya Saing Peternakan

No	Indikator/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Target Output
Ternak bersertifikat /SKLB			
1	Pengembangan SDGH dan Peningkatan Mutu Genetik Ternak (KD/KP) (Laporan)	371,000,000	9
2	Pendampingan Pembibitan di Masyarakat (Laporan)	1,030,230,000	96
Volume ekspor komoditi peternakan			
1	Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (Sampel)	5.843.500.000	1.600
2	Fasilitas PNBP Pengujian Obat Hewan (Laporan)	1.604.952.000	2
3	Peningkatan Daya Saing Hasil Peternakan (Laporan)	200.000.000	1
Investasi subsektor peternakan PMA dan PMDN			
1	Koordinasi/Pembinaan Investasi Peternakan (Laporan)	487,600,000	1
2	Peningkatan Daya Saing Hasil Peternakan (Laporan)	200.000.000	1
Status kesehatan hewan			
1	Pengendalian dan Penanggulangan Rabies (Dosis)	45,749,755,000	1.760.100
2	Pengendalian dan Penanggulangan AI (Dosis)	4,174,380,000	5.557.700
3	Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis (Dosis)	7,403,742,000	73.663
4	Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax (Dosis)	7,430,792,000	501.913
5	Pengendalian dan Penanggulangan Hog Cholera (Dosis)	5,791,815,000	151.813
6	Pengendalian dan Penanggulangan Jembrana (Dosis)	400,000,000	1.813
7	Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau (Ekor)	100,970,988,000	300.000
8	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Rabies (Sampel)	5,058,999,000	10.660
9	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Avian Influenza (Sampel)	5,790,398,000	58.028
10	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Brucellosis (Sampel)	2,535,630,000	42.619
11	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Anthrax (Sampel)	646,260,000	2.043
12	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hog Cholera (Sampel)	1,945,142,000	6.836
13	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Viral (Sampel)	1,624,240,000	15.901
14	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Bakterial (Sampel)	1,009,144,000	8.530
15	Penyidikan dan Pengujian Gangguan Reproduksi (Sampel)	3,995,575,000	19.538
16	Peningkatan Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik (BLU) (Dosis)	16,234,141,000	5.960.525
17	Kesiagaan Wabah PHM (Dosis)	10,842,000,000	250.285
18	Sistim Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANNAS) (Laporan)	6,907,440,000	5

19	Tenaga Harian Lepas Pelayanan Kesehatan Hewan (Orang)	32,725,000,000	1.250
Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan			
1	Fasilitas Peralatan RPH (Unit)	4,656,527,000	2
2	Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (Sampel)	2,657,101,000	9.500
3	Monitoring dan Surveillance Residu dan Cemaran Mikroba (Sampel)	5,377,560,000	22.630
4	Penguatan Manajemen Laboratorium Kesmavet (Unit)	1,107,008,000	1
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesmavet (Unit)	1,566,721,000	4
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lab. Kesmavet (Unit)	1,070,875,000	15
7	Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan (Unit)	90,100,000	3

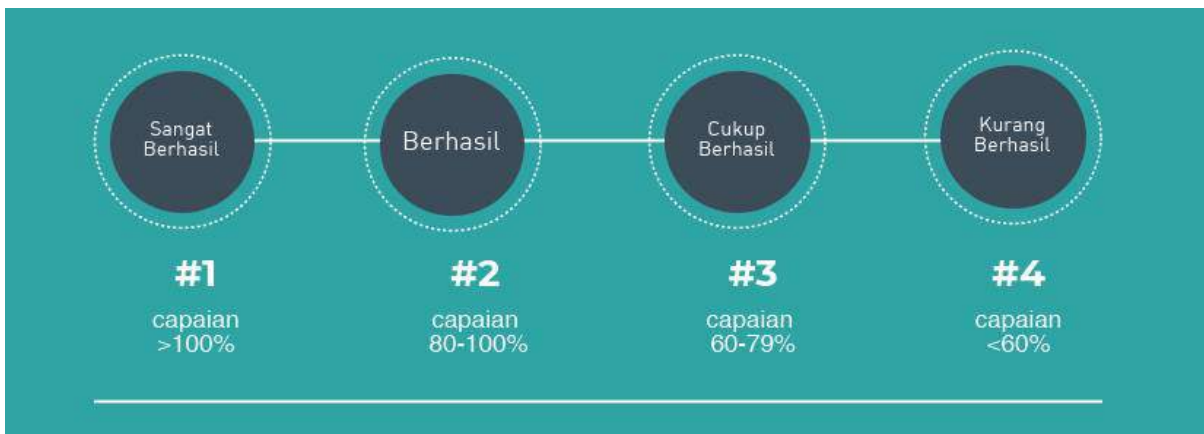
3. Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Peternak

No	Indikator/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Target Output
PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan			
1	Koordinasi/Pembinaan Pengembangan Pemasaran Hasil Peternakan (Laporan)	591,500,000	1
2	Fasilitas Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak (Unit)	532,515,000	1
3	Penguatan Kelembagaan Peternak (Laporan)	5,560,300,000	3
4	Koordinasi/Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Laporan)	4,520,370,000	1
5	Pengembangan Informasi Pasar	540,000,000	10
Nilai tukar peternak (NTP)			
1	Fasilitas Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair (Unit)	250,000,000	1
2	Fasilitas Peningkatan Mutu Produk Olahan (Unit)	450,000,000	3

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2017 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, yaitu:



3.2 Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2017.

Evaluasi dan analisis kinerja PKH tahun 2017 menggunakan dokumen Perjanjian Kinerja yang terakhir yaitu yang direvisi pada bulan September 2017. Revisi PK dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Inspektorat Jenderal terhadap sistem akuntabilitas kinerja Ditjen PKH tahun 2016.

Rata-rata capaian sasaran startegis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017 berkisar antara 59,57-1.155%. Dari dua belas indikator kinerja, terdapat enam indikator kinerja yang capaiannya sangat berhasil (capaian >100%) yaitu Produksi Susu, Ternak bersertifikat /SKLB, Volume ekspor komoditi peternakan, Investasi subsektor peternakan PMA, Investasi subsektor peternakan PMDN, dan Status kesehatan hewan. Sedangkan indikator kinerja yang kurang berhasil (capaian <60%) adalah produksi telur.

Selengkapnya capaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017 disajikan pada Tabel 6

Tabel 6 Capaian Sasaran Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Ukuran Keberhasilan
1	Pemenuhan Pangan Asal Ternak	1) Produksi daging sapi/kerbau (ribu ton)	639,6	564,1	88,19	Berhasil
		2) Produksi ternak lainnya (ribu ton)	3.796,88	2.770,44	72,97	Cukup Berhasil
		3) Produksi telur (ribu ton)	3.536,88	2.106,9	59,57	Kurang Berhasil
		4) Produksi Susu (ribu ton)	910,57	920,1	101	Sangat Berhasil
2	Peningkatan Daya Saing Peternakan	1) Ternak bersertifikat /SKLB (ekor)	2.950	3.210	108,81	Sangat Berhasil
		2) Volume ekspor komoditi peternakan (%)	4	9,85	246,25	Sangat Berhasil
		3) Investasi subsektor peternakan PMA (%)	2	11,3	565	Sangat Berhasil
		Investasi subsektor peternakan PMDN (%)	2	23,1	1.155	Sangat Berhasil
		4) Status kesehatan hewan (%)	76	76,79	101,04	Sangat Berhasil
		5) Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan (%)	72,76	68,94	94,75	Berhasil
3	Peningkatan Kesejahteraan Peternak	1) PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan (Rp Juta)	39,49	35,32	89,44	Berhasil
		2) Nilai tukar peternak (NTP)	107,53	106,95	99,45	Berhasil

Sumber: 1) Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2017; 2) Buku Statistik PKH 2017; 3) Direktorat Kesehatan Hewan; 4) Direktorat Kesmavet; 5) Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; 6) BPS

Berdasarkan penilaian sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu Kementerian Keuangan, nilai kinerja program pembangunan PKH sebesar 89,56% dengan kategori baik. Nilai ini didukung oleh penyerapan anggaran, pencapaian keluaran, konsistensi dan efisiensi yang cukup tinggi. Efisiensi pelaksanaan program pembangunan PKH tahun 2017 bernilai positif sebesar 10,22%, yang berarti Ditjen PKH telah memanfaatkan sumber daya secara optimal dalam pencapaian sarannya. Nilai kinerja program pembangunan PKH disajikan pada Gambar 1



Sumber: Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)

Gambar 1. Nilai Kinerja Program Pembangunan PKH Tahun 2017

Selengkapnya analisis capaian kinerja masing-masing sasaran strategis disampaikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Strategis 1: Pemenuhan Pangan Asal Ternak

Sasaran strategis pemenuhan pangan asal ternak memiliki 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu: (1) produksi daging sapi dan kerbau; (2) produksi daging ternak lainnya; (3) produksi telur; dan (4) produksi susu. Capaian indikator kinerja sasaran strategis pemenuhan pangan asal ternak disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Capaian indikator kinerja sasaran strategis pemenuhan pangan asal ternak

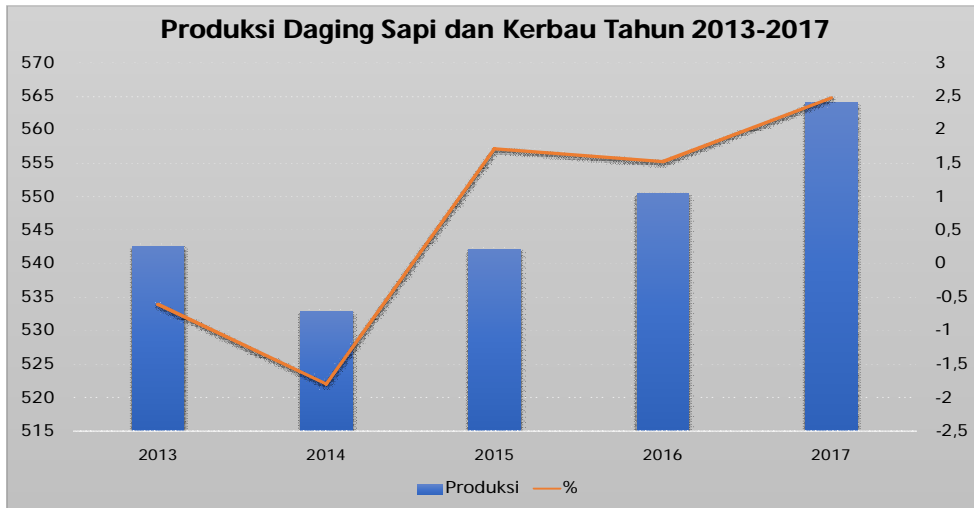
Capaian indikator kinerja sasaran strategis Pemenuhan Pangan Asal Ternak sebagai berikut:

3.2.1.1 Produksi Daging Sapi dan Kerbau

Produksi daging sapi/kerbau merupakan jumlah produksi daging sapi/kerbau nasional (ton) pada tahun 2017. Data produksi daging sapi dan kerbau dihitung dengan rumus: jumlah sapi/kerbau nasional yang dipotong x (berat karkas (kg) + *edible offal* (kg)). Proses pengumpulan data produksi daging sapi/kerbau dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi (verval) yang dilaksanakan secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Pada tahun 2017 produksi daging sapi dan kerbau sebesar 564,02 ribu ton. Dibandingkan dengan target pada tahun 2017 sebesar 639,6 ribu ton, capaian produksi daging sapi dan kerbau tahun 2017 mencapai 88,19%, dengan kategori berhasil. Walaupun belum mencapai target produksi yang ditetapkan, namun jika dibandingkan dengan tahun 2016 produksi daging sapi dan kerbau tahun 2017 meningkat sebesar 2,48%. Peningkatan produksi ini merupakan peningkatan terbesar selama lima tahun terakhir. Rata-rata peningkatan produksi daging sapi dan kerbau selama tahun 2013-2017 meningkat sebesar 0,9 %. Dibandingkan dengan target tahun 2019, capaian

produksi daging sapi dan kerbau telah mencapai 74,70%. Produksi daging sapi dan kerbau serta peningkatannya disampaikan pada Gambar 3



Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2017

Gambar 3. Produksi Daging Sapi dan Kerbau serta Peningkatannya Tahun 2013-2017

Pencapaian produksi daging sapi dan kerbau dipengaruhi oleh populasi ternak sapi dan kerbau. Dalam lima tahun terakhir (2013-2017) populasi ternak sapi dan kerbau mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 6,95%. Selengkapnya populasi ternak sapi dan kerbau tahun 2013-2017 disampaikan pada Gambar 4.



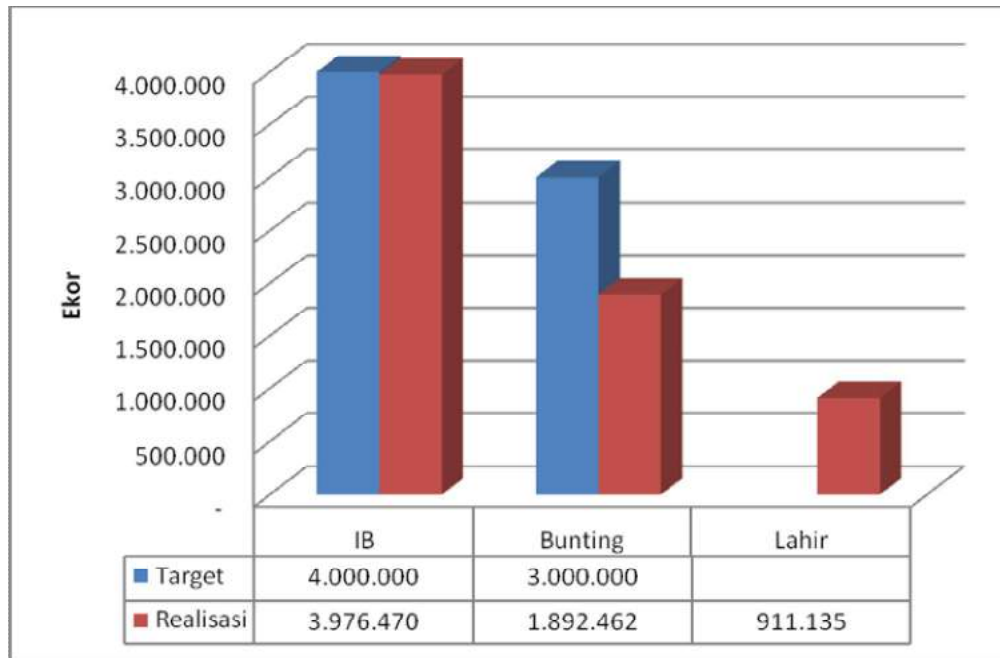
Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2017

Gambar 4. Populasi Ternak Sapi dan Kerbau Tahun 2013-2017

Kenaikan populasi ternak sapi dan kerbau belum cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga pada tahun 2017 Kementerian Pertanian menerbitkan beberapa regulasi:

- (1) Permentan Nomor 2/Permentan/PK.440/2/2017 perubahan atas Permentan Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam wilayah NKRI. Penyempurnaan yang dilakukan dalam Permentan ini adalah terkait jangka waktu pemenuhan rasio swasta/koperasi untuk mengimpor sapi indukan, spesifikasi ternak ruminansia besar, dan masa berlaku rekomendasi.
- (2) Permentan Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Salah satu wujud regulasi tersebut, pada tanggal 14 Desember 2017, Kementerian Pertanian memfasilitasi penandatanganan Mou antara Bank dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mendorong peran aktif, serta sinergi antara Pemerintah Daerah, Perbankan dan investor dalam pengembangan peternakan sapi.

Dalam rangka percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau secara berkelanjutan, Ditjen PKH pada tahun 2017 melaksanakan upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab). Percepatan peningkatan populasi dilaksanakan melalui Inseminasi Buatan (IB). Tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan kegiatan Upsus Siwab. Outcome dari kegiatan Upsus Siwab adalah jumlah IB, Bunting, dan Lahir. Capaian IB secara nasional dikategorikan berhasil, dimana dari target 4 juta ekor, telah dilaksanakan IB sebanyak 3.976.470 atau 99,41%. Sedangkan capaian bunting baru mencapai 1.892.462 ekor, dari target 3.000.000 ekor atau 63,08%. Pencapaian bunting masih perlu dipastikan pada bulan maret 2018, untuk mengukur keberhasilan IB bulan Desember 2017. Sedangkan kelahiran pada tahun 2017 sebesar 911.135 ekor. Selengkapnya capaian UPSUS SIWAB disajikan pada Gambar 5.



Sumber: Sekretariat Nasional Upsus Siwab Ditjen PKH Tahun 2017

Gambar 5. Capaian UPSUS SIWAB Tahun 2017

Selain bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak sapi dan kerbau, kegiatan UPSUS SIWAB juga diharapkan memberikan dampak ekonomi secara nasional. Dampak ekonomi kegiatan UPSUS SIWAB dihitung dari nilai jual pedet lepas sapih (umur 6 bulan), dimana harga rata-rata pedet lepas sapih sebesar Rp 8 juta rupiah, jika dikalikan dengan jumlah kelahiran 911.135 ekor, maka dampak ekonomi yang dihasilkan kegiatan UPSUS SIWAB sebesar Rp 7,28 triliun. Sementara input pelaksanaan UPSUS SIWAB sebesar Rp 1,07 triliun yang terdiri dari: (1) pelayanan optimalisasi reproduksi untuk 4 juta akseptor sebesar Rp 762,56 miliar; (2) penanganan gangguan reproduksi sebesar Rp 100,5 miliar; (3) pengembangan HPT 13.000 Ha, sebesar Rp 175,2 miliar; dan (4) pengendalian sapi betina produksi di 40 lokasi sebesar Rp 36,38 miliar.

Jika dibandingkan antara input dan dampak ekonomi UPSUS SIWAB, maka dapat disimpulkan bahwa setiap 1 rupiah fasilitas APBN pada kegiatan UPSUS SIWAB mampu mengungkit investasi pembangunan sebesar 7,28 rupiah. Selain dampak terhadap investasi, UPSUS SIWAB juga memberikan dampak lain seperti: (1) peningkatan lapangan

kerja baru tenaga teknis bidang peternakan (inseminator dan paramedik) di pedesaan, dimana semula sebanyak 6.000 orang menjadi 8.000 orang; dan (2) meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam usaha peternakan sapi dengan adanya insentif pelayanan.

Beberapa kendala dan kelemahan pelaksanaan UPSUS SIWAB, antara lain: (1) rancangan satuan biaya komponen SIWAB yang tidak akurat; (2) kurang optimalnya tata kelola administrasi keuangan terkait pembiayaan operasional pelayanan SIWAB (Operasional IB dan PKb); (3) keberagaman pemahaman tentang pedoman UPSUS SIWAB; (4) Keterbatasan SDM IB, PKB, ATR utamanya di Indonesia Timur; (5) kurang optimalnya koordinasi pelaksanaan antara Provinsi dan Kab/Kota menjadi bagian penting untuk perbaikan pelaksanaan SIWAB tahun 2018.

Untuk menindaklanjuti kendala tersebut, beberapa hal yang telah dan akan dilakukan antara lain: (1) penyesuaian satuan biaya komponen SIWAB tahun 2018, (2) menempatkan penanggung jawab administrasi di masing-masing kabupaten/kota untuk mengoptimalkan tata kelola administrasi keuangan terkait pembiayaan operasional pelayanan SIWAB; (3) mensosialisasikan pedoman Upsus Siwab pada akhir tahun 2017; dan (4) menambah pelatihan petugas IB, PKB, dan ATR.

Selain Upsus Siwab, pada tahun 2017 Ditjen PKH juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian produksi daging sapi/kerbau, dengan realisasi sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp Juta)			Output		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT (Ha)	9.119,78	8.449,13	92,65	752	755	100,40
2	Pengembangan Kebun HPT di UPT (Ha)	11.989,79	11.614,57	96,87	511	518	101,37
3	Sarana Pengembangan Pakan dan HPT di UPT (Unit)	3.067,90	3.031,46	98,81	183	198	108,20
4	Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas (Stek)	112.399,59	94.583,40	84,15	98.873.476	80.284.186	81,20
5	Penguatan Pakan Tambahan untuk Ternak Gangguan	19.891,36	17.137,68	86,16	3.157	2.896	81,20

	Reproduksi (Ton)						
6	Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT (Ton)	37.754,61	36.970,61	97,92	7.774	7.752	99,72
7	Pengujian Mutu Pakan dan Sertifikasi Pakan (Sampel)	1.126,31	1.124,25	99,82	2.000	4.025	201,25
8	Penguatan Sarana dan Prasarana Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Sapi Potong (Paket)	4.398,40	4.322,63	98,28	3	2	66,67
9	Pengembangan Populasi Sapi Potong (Klp)	40.947,91	38.032,91	92,88	147	143	97,28
10	Pengembangan Populasi Kerbau (Klp)	1.464,20	1.365,95	93,29	5	5	100,00
11	Optimalisasi Reproduksi (Ekor)	622.422,38	522.477,58	83,94	4.000.000	3.976.470	99,41
12	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Potong (Ekor)	22.485,81	21.570,60	95,93	2.189	4.884	125,26
13	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Kerbau (Ekor)	1.456,51	1.271,91	87,93	373	75	20,11
14	Peningkatan Kualitas Semen Beku (Dosis)	9.386,50	9.195,84	97,97	2.200.000	2.318.999	105,41
15	Peningkatan Kualitas Semen Beku (BLU) (Dosis)	11.028,00	10.751,21	97,49	2.375.000	1.914.877	80,63
16	Peningkatan Produksi Embrio Ternak (Embrio)	2.628,81	2.607,17	99,18	800	877	109,83
17	Fasilitasi Bangunan RPH (Unit)	10.252,80	9.838,73	95,96	3	2	66,67
18	Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif (Lokasi)	30.729,41	25.059,78	81,55	40	40	100,00

Kegiatan yang tidak terealisasi antara lain disebabkan oleh: (1) keterlambatan proses pengadaan yang disebabkan antrian di ULP pemerintah daerah, sehingga beberapa kegiatan tidak terealisasi seperti penanaman pakan berkualitas, peningkatan populasi ternak sapi, dan fasilitasi bangunan RPH; dan (2) peningkatan kualitas semen beku terkendala oleh kondisi pejantan di UPT yang sudah tua dan harus diafkir sehingga produksi semennya menurun.

Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi daging sapi, terdapat efisiensi sebesar 11,15%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan produksi daging sapi dan kerbau dapat memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia untuk

mencapai target yang ditetapkan. Penilaian efisiensi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011, dengan batas nilai efisiensi -20% – +20%. Selengkapnya nilai efisiensi masing-masing indikator kinerja disampaikan pada Lampiran 5.

3.2.1.2 Produksi Daging Ternak Lainnya




Produksi daging ternak lainnya merupakan jumlah produksi daging ternak lainnya (kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik) nasional pada tahun 2017. Teknik menghitung produksi daging ternak lainnya= jumlah ternak lainnya (kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik) nasional yang dipotong x (berat karkas (kg) + *edible offal* (kg)). Seperti halnya produksi daging sapi/kerbau, proses pengumpulan produksi daging ternak lainnya juga dilakukan melalui mekanisme verbal.

Capaian produksi daging ternak lainnya pada tahun 2017 sebesar 2.770,44 ribu ton. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 3.796,88 ribu ton, capaian produksi daging ternak lainnya baru mencapai 72,97%, dengan kategori Cukup Berhasil. Dibandingkan dengan tahun 2016, produksi daging ternak lainnya mengalami penurunan sebesar 0,91%. Penurunan disebabkan oleh menurunnya produksi daging ayam ras pedaging sebesar 3,01%, sedangkan produksi ternak kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras petelur dan itik mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 4.167,51 ribu ton, capaian produksi daging ternak lainnya sebesar 66,48%.

Tidak tercapainya target produksi ternak lainnya disebabkan oleh produksi daging babi, ayam buras, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging, tidak mencapai targetnya. Ayam ras pedaging merupakan komponen terbesar dalam produksi daging ternak lainnya sebesar 67%.

Pada tahun 2017, dalam rangka menstabilkan harga daging ayam, Ditjen PKH melaksanakan kegiatan afkir pada Parent Stock (PS). Afkir terhadap PS ini dilaksanakan

oleh 40 perusahaan dengan total pemotongan sebanyak 2.949.584 ekor (98,32%) dari target 3 juta ekor. Selengkapnya capaian produksi ternak lainnya pada Gambar 6.

			
Kambing Ribuk Ton	67,32	70,00	✓
Domba Ribuk Ton	52,27	54,80	✓
Babi Ribuk Ton	375,80	344,20	✗
Ayam Buras Ribuk Ton	334,44	296,20	✗
Ayam Ras Petelur Ribuk Ton	119,51	114,00	✗
Ayam Ras Pedaging Ribuk Ton	2.805,26	1.848,10	✗
Itik Ribuk Ton	42,37	43,2	✓

Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2017

Gambar 6. Capaian Produksi Daging Ternak Lainnya Tahun 2017

Kegiatan yang mendukung produksi daging ternak lainnya antara lain:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp Juta)			Output		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pengembangan Populasi Kambing (Klp)	430,00	428,96	99,67	2	2	100,00
2	Pengembangan Populasi Domba (Klp)	577,15	500,81	86,77	3	3	100,00
3	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Kambing (Ekor)	725,64	713,36	98,31	1.150	1.237	107,57
4	Pengembangan Populasi Babi (Klp)	1.425,88	1.397,64	98,02	10	10	100,00
5	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Babi (Ekor)	278,10	194,25	68,85	730	710	97,26
6	Pengembangan Populasi Itik (Klp)	756,20	706,56	93,43	25	25	100,00
7	Pengembangan Populasi Ayam Lokal (Klp)	7.940,63	4.787,04	60,29	275	271	98,55
8	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Ayam (Ekor)	1.717,59	1.098,94	63,98	190.100	317.048	166,78
9	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Itik (Ekor)	694,11	675,75	97,36	413.889	354.818	85,73

Hasil analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung produksi daging ternak lainnya, didapatkan hasil efisiensi sebesar 20%.

3.2.1.3 Produksi Telur

Produksi telur adalah jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, dan itik) nasional (ribu ton) pada tahun 2017. Jumlah produksi telur dihitung dengan rumus: jumlah betina produktif x produktivitas unggas. Proses pengumpulan data produksi telur juga dilakukan melalui metode verwal.

Produksi telur secara nasional tahun 2017 sebesar 2,11 juta ton, jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 2,03 juta ton, maka produksi tahun 2017 meningkat 3,94%. Jika dibandingkan dengan target produksi tahun 2017 sebesar 3,54 juta ton, maka capaian kinerjanya sebesar 59,60% . Dibandingkan target produksi telur pada tahun 2019 sebesar 3,77 juta ton, capaian produksi telur di tahun 2016 baru mencapai 55,97%.

Peningkatan produksi tahun 2017 didukung oleh pertumbuhan produksi telur ayam buras 2,83%, ayam ras petelur 4,04% dan itik 4,17%. seperti yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Produksi telur tahun 2016-2017

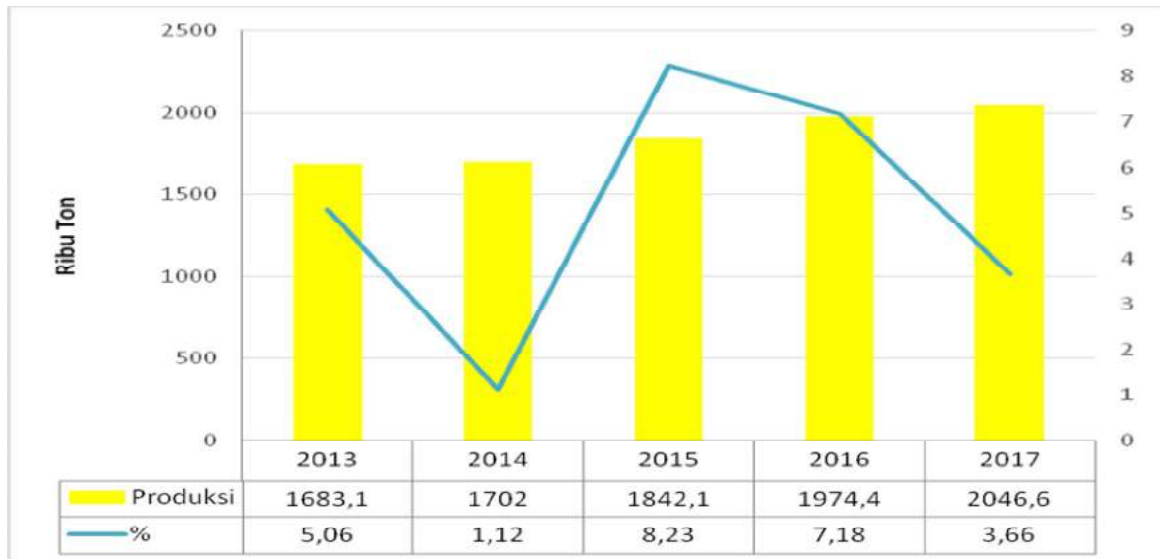
(000 ton)

No	Komoditas	Produksi			Capaian Produksi Tahun 2017 terhadap Target	Pertumbuhan tahun 2017 terhadap 2016
		2016	2017*			
			Target	Realisasi		
1	Ayam Buras	196,7	208,34	210,9	101,23	7,22
2	Ayam Ras Petelur	1.485,7	3.050,42	1.527,1	50,06	2,79
3	Itik	292,0	307,10	308,6	100,49	5,68
Total		1.974,4	3.540,00	2.046,6	59,60	3,66

Keterangan :

1. Sumber data Statistik Ditjen PKH 2017
2. *= angka sementara

Selama kurun waktu 2013-2017, capaian produksi telur menunjukkan trend peningkatan, rata-rata 5,05% per tahun, yang selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 7.



Sumber: Statistik Peternakan Tahun 2017

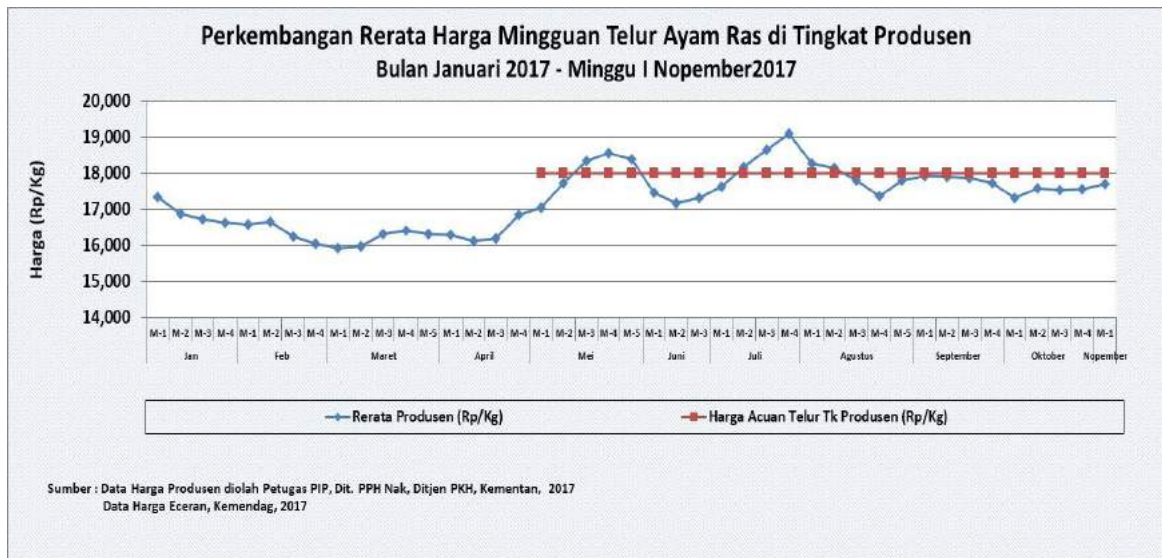
Gambar 7. Trend Produksi Telur Tahun 2013-2017

Kegiatan-kegiatan pendukung capaian kinerja produksi telur adalah:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp Juta)			Output		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pengembangan Populasi Itik (Klp)	756,20	706,56	93,43	25	25	100,00
2	Pengembangan Populasi Ayam Lokal (Klp)	7.940,63	4.787,04	60,29	275	271	98,55
3	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Ayam (Ekor)	1.717,59	1.098,94	63,98	190.100	317.048	166,78
4	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Itik (Ekor)	694,11	675,75	97,36	413.889	354.818	85,73

Belum tercapainya target produksi telur dapat disebabkan oleh fluktuasi harga telur ayam ras pada tahun 2017. Rerata harga telur ayam ras di tahun 2017 berkisar terendah dari Rp. 15.933,-/Kg di bulan Maret Minggu I dan tertinggi Rp. 19.904,-/Kg di bulan Juli Minggu I. Harga telur ayam ras di tahun 2017 cukup berfluktuatif tetapi cenderung ada peningkatan yang disebabkan oleh sebagian besar peternak yang melakukan peremajaan ayam ras petelur sehingga mempengaruhi telur yang beredar di pasar dan menurunnya suplai dari wilayah sentra telur. Selengkapnya perkembangan harga komoditas telur

ayam ras di tingkat produsen sampai minggu I November 2017 disampaikan pada Gambar 8.



Gambar 8. Perkembangan Harga Komoditas Telur Ayam Ras Di Tingkat Produsen Sampai Minggu Ke I November 2017

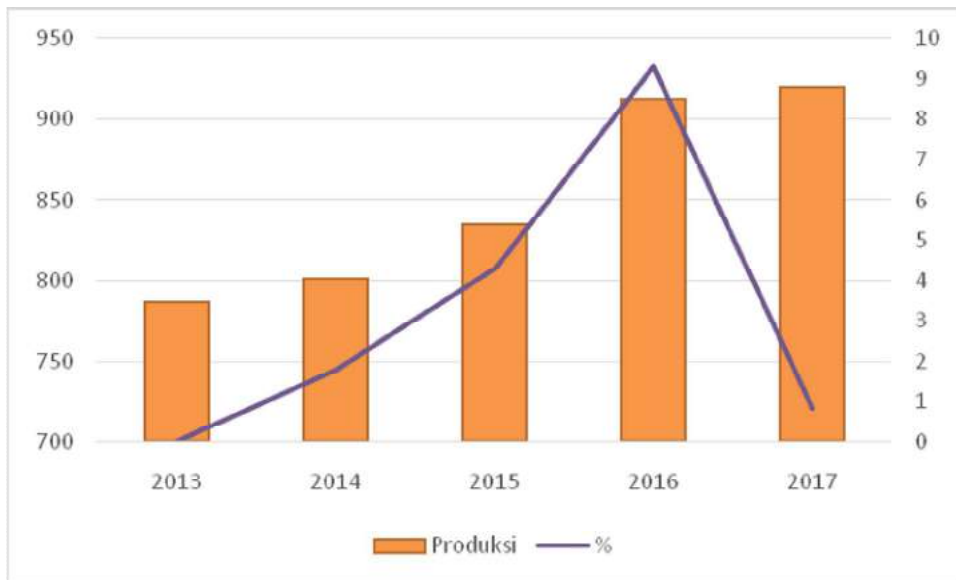
Analisis efisiensi menunjukkan kegiatan pendukung pencapaian produksi telur tahun 2017 efisien dalam penggunaan sumber daya dengan nilai efisiensi sebesar 20%.

3.2.1.4 Produksi Susu

Produksi susu adalah jumlah produksi susu sapi perah nasional pada tahun 2017. Teknik menghitung produksi susu adalah betina produktif sapi perah (didapat dari persen betina produktif terhadap populasi sapi perah x populasi sapi perah) x produktivitas sapi perah. Proses pengumpulan data produksi susu dilaksanakan melalui metode verwal.

Produksi susu nasional tahun 2017 (angka sementara) sebesar 920,1 ribu ton, jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 912,7 ribu ton, maka produksinya meningkat 0,81%. Jika dibandingkan dengan target produksi tahun 2017 sebesar 910,7 ribu ton, maka capaian kinerjanya sebesar 101,03%. Capaian produksi susu tahun 2017 telah mencapai 86,51% dari target produksi susu tahun 2019 sebesar 1.063,56 ribu ton.

Selama kurun waktu 2013-2017, capaian produksi susu menunjukkan peningkatan, rata-rata 3,23% per tahun, yang selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9 Produksi Susu Tahun 2013-2017

Tercapainya sasaran produksi susu didukung oleh kegiatan-kegiatan:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp Juta)			Output		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pengembangan Populasi Sapi Perah (Klp)	3.945,52	3.641,89	92,30	7	7	100,00
2	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Perah (Ekor)	2.529,99	2.526,46	99,86	1.350	1.404	104,00

Analisis efisiensi menunjukkan bahwa kegiatan pendukung capaian produksi susu efisien, dengan nilai 6,21%.

Capaian produksi susu telah melebihi targetnya pada tahun 2017, namun produksi susu tersebut baru dapat memenuhi 22% dari kebutuhan nasional, dimana sisanya dipenuhi dari impor. Beberapa kendala dalam meningkatkan produksi susu dalam negeri adalah: (1) belum adanya regulasi dalam bidang persusuan; (2) posisi tawar peternak sapi perah melemah karena tingginya ketergantungan pemasaran susu kepada Industri Pengolah Susu (IPS); (3) IPS lebih mengutamakan susu impor sebagai bahan baku dalam

pengolahan susu; (4) Teknologi pengolahan susu dalam negeri belum optimal diterapkan oleh peternak.

Pada tahun 2017 Ditjen PKH telah menerbitkan Permentan Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu. Penerbitan Permentan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri karena adanya sinergisme (kemitraan) dengan pelaku usaha persusuan dan untuk memenuhi penyediaan pangan. Inti dari Permentan ini meliputi: (1) penyediaan; (2) peredaran susu segar dalam negeri; (3) kemitraan yang lebih baik dalam seluruh siklusnya, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan. Dalam penerapan Permentan tersebut perlu dilaksanakan program kemitraan antara peternak dengan pihak swasta.

Produksi daging, telur dan susu tahun 2017 selengkapnya disampaikan pada Lampiran 4.

3.2.2 Sasaran Strategis 2: Peningkatan Daya Saing Peternakan

Sasaran strategis peningkatan daya saing peternakan memiliki 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu: (1) Ternak bersertifikat /SKLB; (2) Volume ekspor komoditi peternakan; (3) Investasi sub sektor peternakan (PMA dan PMDN); (4) Status kesehatan hewan; dan (5) Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan . Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis peningkatan daya saing peternakan sangat berhasil. Analisis terhadap capaian masing-masing indikator peningkatan daya saing peternakan disampaikan sebagai berikut:

3.2.2.1 Ternak bersertifikat /SKLB

Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) merupakan pra sertifikasi bibit ternak, dari sisi manajemen mutu masih perlu pembenahan untuk mendapatkan sertifikasi bibit SNI. SKLB diterapkan di ternak masyarakat, kelompok atau UPTD perbibitan. SKLB diterbitkan oleh dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Jumlah Surat Keterangan Layak Bibit yang diterbitkan pada tahun 2017 sebesar 3.210 ekor atau 108,81% dari target 2.950 ekor. Rincian jumlah SKLB per jenis ternak disampaikan pada Tabel 8.

Tabel 8 Rincian Jumlah SKLB per Jenis Ternak Tahun 2017

No	Jenis Ternak	Jumlah SKLB
1	Sapi Potong	2.005
2	Sapi Perah	477
3	Kerbau	68
4	Kambing Perah	334
5	Kambing Potong	326
	Total	3.210

Sumber: Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, capaian ternak bersertifikat tahun 2017 telah mencapai 113,35%.

Indikator ternak bersertifikat/SKLB didukung oleh kegiatan:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp Juta)			Output		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pengembangan SDGH dan Peningkatan Mutu Genetik Ternak (KD/KP) (Laporan)	371,00	199,62	53,80	9	8	88,89
2	Pendampingan Pembibitan di Masyarakat (Laporan)	1.030,23	818,18	79,42	96	90	93,75

Analisis efisiensi terhadap kegiatan pendukung capaian indikator ternak bersertifikat/SKLB juga menunjukkan nilai positif sebesar 20%.

Contoh SKLB disampaikan pada Lampiran 6.

3.2.2.2 Volume ekspor komoditi peternakan

Perhitungan volume ekspor komoditi peternakan tahun 2017 menggunakan angka sementara (sampai dengan November 2017) dengan sumber data berasal dari Pusdatin.

Sampai dengan November 2017 realisasi volume ekspor komoditas peternakan sebesar 208.739 ton meningkat sebesar 9.85% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016 (190.026 ton). Capaian tersebut jika dibanding dengan target capaian tahun 2017 sebesar 4%, maka termasuk dalam kategori sangat berhasil yaitu tercapai 246,25%. Pada tabel di bawah dapat dilihat realisasi dan pertumbuhan volume ekspor untuk 10 komoditas ekspor terbesar mulai tahun 2012 – 2017 per komoditas.

Tabel 9. Realisasi dan Pertumbuhan Volume Ekspor 10 Komoditas Ekspor Terbesar, Tahun 2012 - 2017

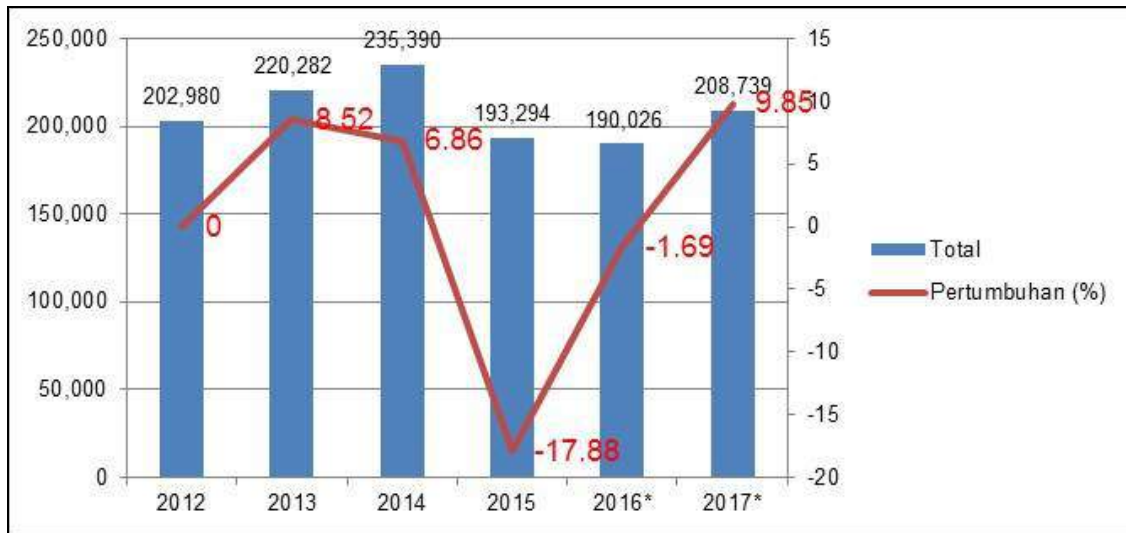
		Volume (Ton)						
No	Komoditas	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*	Growth 2017 thd 2016 (%)
1	Lemak	74.037	80.385	97.586	80.158	80.566	98.706	22,5
2	Susu dan Kepala Susu	38.413	37.043	38.890	27.173	29.874	25.404	-15,0
3	Pakan ternak	24.259	32.922	35.805	32.058	33.849	40.481	19,6
4	Babi Hidup	35.370	36.675	32.275	28.146	25.041	26.535	6,0
5	Mentega	12.298	13.848	13.544	9.230	3.788	3.915	3,3
6	Kulit dan Jangat	7.909	7.498	5.025	4.133	3.480	2.738	-21,3
7	Daging dan Jeroan Binatang Lainnya	4.070	4.679	4.662	4.262	4.259	3.363	-21,0
8	Yoghurt	714	1.029	2.099	2.873	1.412	691	-51,0
9	Bulu	1.344	1.800	1.633	1.356	1.176	1.819	54,7
10	Keju & Dadih Susu	749	849	650	638	2.584	1.273	-50,7
11	Lainnya	3.817	3.553	3.222	3.268	3.996	3.815	-4,5
	Total	202.980	220.282	235.390	193.294	190.026	208.739	9,8
	Pertumbuhan (%)	-	8,52	6,86	-17,88	-1,69	9,85	

Sumber : Pusat Data dan Informasi Pertanian, Kementerian
Keterangan : *) = sampai dengan November 2017

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2017 ekspor lemak merupakan komoditas ekspor terbanyak yaitu sebesar 47,3% dari total volume ekspor komoditi peternakan. Sedangkan ekspor bulu merupakan komoditas yang mengalami pertumbuhan yang paling besar yaitu sebesar 54,7% (2016 - 2017).

Sebagian besar komoditas ekspor terbesar tersebut di atas merupakan produk olahan hasil peternakan kecuali ekspor babi hidup. Ekspor babi hidup merupakan ekspor hewan ternak yang terbanyak dibanding hewan ternak lainnya. Volume ekspor babi hidup tahun 2017 sampai dengan November 2017 sebesar 26.535 ton, meningkat sebesar 6% dibanding periode yang sama tahun 2016 (25.041 ton). Singapura adalah pasar utama ekspor babi, karena warga Singapura lebih menyukai daging babi asal Indonesia

daripada yang berasal dari Eropa dan Brazil. Dengan harga daging babi kita yang lebih murah dibanding negara-negara Asia lainnya, tidak menutup kemungkinan bisa menembus pasar Eropa. Pada gambar 10 disajikan realisasi dan pertumbuhan volume ekspor tahun 2012-2017



Gambar 10. Realisasi dan Pertumbuhan Volume Ekspor, 2012 - 2017

Selama periode 2012 - 2017 total volume ekspor komoditi peternakan mengalami fluktuasi yang cukup besar, dapat dilihat bahwa peningkatan volume ekspor terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 9,85% sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan volume ekspor sebesar 17,88%.

Kegiatan yang mendukung capaian volume ekspor komoditi peternakan adalah:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp Juta)			Output		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (Sampel)	5.843,50	5.707,65	97,68	1.600	2.337	146,06
2	Fasilitas PNBPN Pengujian Obat Hewan (Laporan)	1.604,95	1.338,08	83,37	2	2	100,00
	Peningkatan Daya Saing Hasil Peternakan (Laporan)	200,00	195,90	97,95	1	1	100,00

Hasil analisis efisiensi terhadap kegiatan pendukung volume ekspor komoditi peternakan juga menunjukkan nilai positif sebesar 20%.

Selain kegiatan diatas, untuk meningkatkan volume ekspor komoditi peternakan telah dilakukan pengembangan pasar internasional melalui pengembangan satu unit informasi pasar, promosi dan advokasi, kerjasama dan harmonisasi terutama ke dua negara, yaitu Singapura dan Jepang. Namun baru berhasil ekspor telur asin ke Singapura dan masih banyak mengalami kendala terutama terkait adanya residu *antibiotic* dan *traceability* produk yang masih belum sempurna.

3.2.2.3 Investasi subsektor peternakan

Investasi subsektor peternakan terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi PMA tahun 2017 (angka s.d september) mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 11,3%. Jika dibandingkan dengan target 2% peningkatan PMA mencapai 565% (sangat berhasil). Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, capaian PMA tahun 2017 telah mencapai 452%. Jika dirinci berdasarkan negara, PMA sub sektor peternakan terbesar berasal dari negara Singapura dengan nilai investasi sebesar US\$108,34% (75,3% dari total PMA sub sektor peternakan). kemudian disusul oleh Malaysia sebesar US\$18,53 (12,9 persen), Mauritius sebesar US\$8,92 juta (6,2 persen), Kepulauan Virgin Britania Raya sebesar US\$5,16 juta (3,6 persen), dan Gabungan Negara (Australia, Hongkong, Inggris, Korea Selatan, Taiwan, dan Yaman) sebesar US\$2,94 juta (2,0 persen). Selengkapnya nilai PMA sub sektor peternakan berdasarkan negara disajikan pada Gambar 11.



Gambar 11 Investasi PMA Sub Sektor Peternakan Berdasarkan Negara Tahun 2017

Investasi PMDN tahun 2017 (angka s.d september) mengalami peningkatan sebesar 23,1%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 2%, capaian indikator kinerja PMDN tahun 2017 sebesar 1.155%. jika dibandingkan dengan target tahun 2019, capaian peningkatan PMDN tahun 2017 telah mencapai 770%. Jika nilai PMDN subsektor peternakan periode Jan-Sep 2017 dirinci menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), maka nilai investasi paling besar adalah peternakan unggas sebesar Rp504,83 miliar (81,4 persen), kemudian diikuti oleh peternakan sapi dan kerbau sebesar Rp76,13 miliar (12,3 persen), dan peternakan lainnya sebesar Rp39,39 miliar (6,3 persen). Realisasi investasi PMDN berdasarkan sub sektor disajikan pada Lampiran 7.

Kegiatan yang mendukung capaian indikator sub sektor peternakan adalah:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp Juta)			Output		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Koordinasi/Pembinaan Investasi Peternakan (Laporan)	487,60	435,02	89,22	1	1	100,00
2	Peningkatan Daya Saing Hasil Peternakan (Laporan)	200,00	195,90	97,95	1	1	100,00

Hasil analisis efisiensi terhadap kegiatan ini menunjukkan nilai efisiensi positif sebesar 8,24%.

Dalam upaya membuka peluang investasi dan peluang pasar di bidang peternakan serta mendorong minat investor untuk usaha peternakan telah diupayakan pemerintah untuk meningkatkan peran swasta melalui serangkaian kebijakan investasi peternakan di Indonesia melalui langkah-langkah:

- (1) Penyediaan *tax allowance* atau pengurangan pajak bagi pelaku usaha bidang peternakan melalui Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2015 dan perubahannya nomor 9 tahun 2016 dengan cakupan produk usaha pembibitan sapi potong dan budidaya penggemukan sapi lokal. Peraturan Pemerintah ini saat ini dalam proses revisi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Direktorat Jenderal PKH melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PKH Nomor 16001/KU.030/F1/)/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang usulan revisi PP Nomor 9 Tahun 2016 JO. PP Nomor

18 Tahun 2015 tentang fasilitas pajak penghasilan. Yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Usulan revisi dimaksud adalah cakupan produk menjadi pembibitan/pembiakan sapi potong dan budidaya sapi perah, dengan persyaratan salah satunya melakukan kemitraan dengan peternak kecil. Usulan ini sudah beberapa kali dibahas di tingkat nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- (2) Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Dimana bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan: yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, yaitu Pembibitan dan budidaya babi dengan jumlah kurang atau sama dengan 125 ekor, dan usaha pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya
- (3) Adanya kemudahan pengurusan izin melalui satu pintu dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2008 tentang insentif daerah (pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak).
- (4) Adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi sebagai mitigasi resiko usaha peternakan sapi dengan pertanggungjawaban untuk resiko kematian karena sakit, beranak dan kecelakaan, serta kehilangan sapi, sehingga pelaku usaha merasa lebih tenang menjalankan usahanya dan terjamin keberlanjutan usahanya. Pada tahun 2017 berdasarkan telah difasilitasi AUSTS sebanyak 63.554 ekor sapi.
- (5) Telah disusun dan dilaksanakannya public hearing Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Perijinan Usaha Peternakan sebagai revisi dari Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404 Tahun 2002. Revisi ini lebih kepada penyesuaian skala usaha yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan terkait dengan upaya pengembangan kemitraan.

Investasi sub sektor peternakan, PMA dan PMDA selama periode 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 10 dibawah ini.

Tabel 10 Investasi Sub Sektor Peternakan, 2012-2017

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016	Jan-Sep 2017
	TOTAL	110.495	357.000	681.121	398.341	514.161	764.242
1	PMDN (Rp. Juta)	90.673	347.277	650.680	325.431	465.550	620.357
	Pertumbuhan per tahun (%)		74	47	-100	30	25
a	Peternakan Sapi dan Kerbau	16.323	25.825	129.261	27.006	28.979	76.131
b	Peternakan Domba dan Kambing	-	-	-	-	-	-
c	Peternakan Babi	-	-	-	-	-	-
d	Peternakan Unggas	43.371	321.452	515.205	292.210	436.571	504.835
e	Peternakan Lainnya	30.979	0	6.214	6.214	0	39.391
2	PMA (US\$. Ribu)	19.822	9.723	30.442	72.911	48.611	143.886
	Pertumbuhan per tahun (%)		-104	68	58	-50	66
a	Peternakan Sapi dan Kerbau	22	0	16.655	10.289	18.997	704
b	Peternakan Domba dan Kambing	-	-	-	-	180	0
c	Peternakan Babi	-	-	-	300	145	0
d	Peternakan Unggas	18.225	9.473	13.784	62.232	25.374	143.181
e	Peternakan Lainnya	1.575	250	2	90	3.915	0

Sumber : BKPM, diolah oleh Ditjen PKH

Pertumbuhan nilai investasi ini selain dipengaruhi oleh upaya-upaya tersebut di atas juga dapat dilihat pengaruhnya dari perkembangan posisi atau ranking Indonesia pada *Global Competitiveness Index* yang diterbitkan oleh *World Economic Forum* dan *Ease of doing business index* yang diterbitkan oleh *World Bank Group*. Berdasarkan kedua posisi dimaksud, Indonesia mulai tahun 2014 mengalami perbaikan yang signifikan dalam peningkatan daya saing global, yaitu dari rangking ke 50 menjadi rangking 38 dan bertahan pada awal tahun 2017 ini menjadi rangking ke 36. Indeks daya saing global ini dinilai berdasarkan 12 pilar, yaitu institusi, infrastruktur, kondisi ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan lanjutan dan pelatihan, efisiensi pemasaran, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, potensi pasar (*market size*), kepuasan berbisnis, dan inovasi. Pada pilar institusi termasuk didalamnya regulasi dan transparansi dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Begitu juga dari kemudahan berbisnis Indonesia mengalami perbaikan mulai tahun 2013, yaitu dari rangking ke 129 pada tahun 2012 terus menurun sampai tahun 2015-2016 menjadi 109. Dan terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2016-2017, yaitu dari rangking ke

109 menjadi 91. Indeks kemudahan berbisnis ini dinilai berdasarkan sub indeks *starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, registering property, getting credit, protectig investor, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts*, dan *revolving insolvency*. Selain itu indeks ini juga menunjukkan informasi *good practices* dan *transparency in bussiness regulation*. Secara rinci posisi atau ranking Indonesia pada kedua index tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11 Posisi Indonesia pada *Global Competitiveness Index*, 2012-2017

Periode Tahun	Ranking	Nilai
2012 2013	50	4,4
2013 2014	38	4,5
2014 2015	34	4,6
2015 2016	37	4,5
2016 2017	41	4,5
2017 2018	36	4,7

Sumber : *World Economic Forum*

Tabel.12 *Ease of doing business index*, 2011-2017

Periode Tahun	Ranking
2011 2012	129
2012 2013	128
2013 2014	120
2014 2015	114
2015 2016	109
2016 2017	91
2017 2018	72

Sumber : *World Bank Group*

Meskipun capaian investasi sub sektor peternakan telah melebihi targetnya, namun jika dibandingkan dengan investasi sub sektor pertanian lainnya perkembangan investasi masih sangat lamban baik PMA maupun PMDN. Kecilnya minat investasi pada usaha peternakan dikarenakan beberapa faktor antara lain: (1) tingkat resiko usaha yang lebih tinggi dibandingkan usaha di bidang lainnya; (2) investasi yang dibutuhkan lebih besar; (3) pengembalian modal yang lebih lama; dan (4) pelaksanaan investasi dilakukan secara bertahap dan jangka waktunya lebih lama. Dalam upaya menciptakan iklim investasi

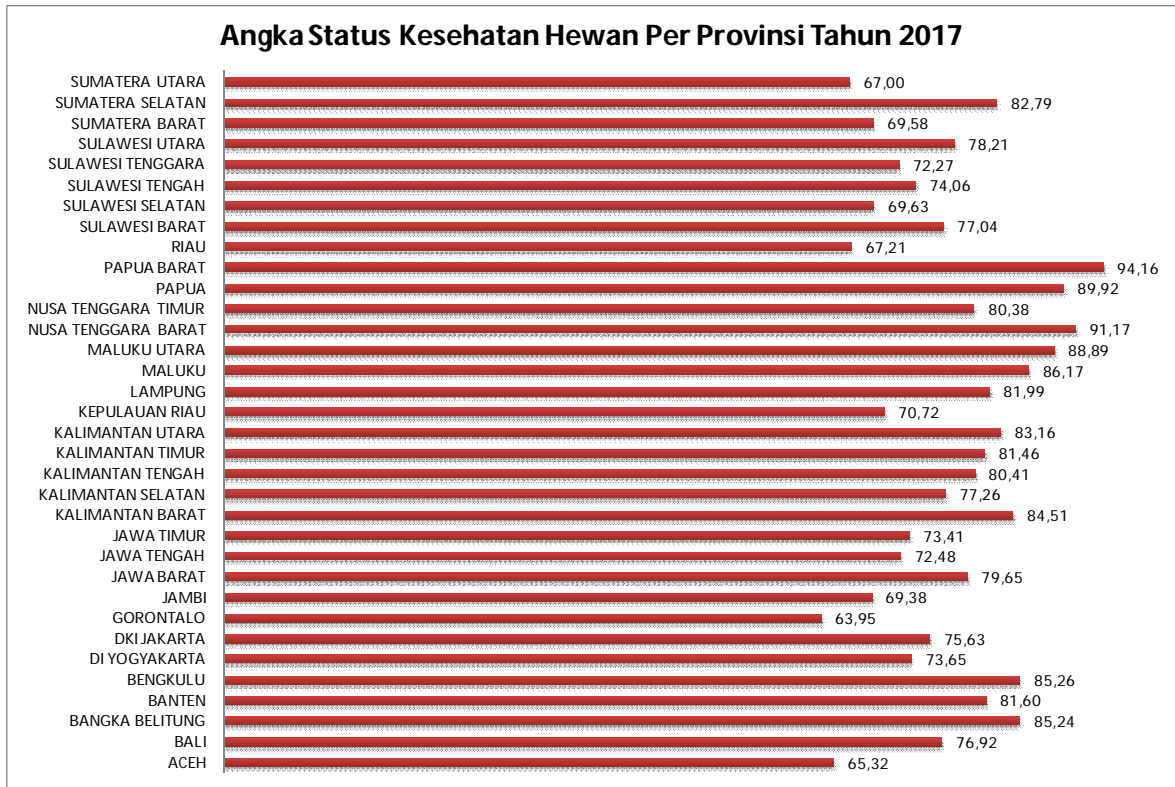
yang kondusif untuk meningkatkan minat investor, diperlukan aspek pendukung yaitu lahan, regulasi, fasilitas pembiayaan, dan insentif bagi pelaku usaha.

3.2.2.4 Status Kesehatan Hewan

Status kesehatan hewan adalah peningkatan produksi pangan asal ternak dan peningkatan daya saing peternakan melalui kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis (PHMSZ). Status kesehatan hewan merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di masing-masing provinsi. angka status kesehatan hewan dihitung melalui surveilance penyakit lima PHMSZ (Rabies, Brucellosis, Hog Cholera, Anthrax, dan AI).

Pada tahun 2017 status kesehatan hewan sebesar 76,79% atau 101,04% dari target 76%. Dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 76,57%, capaian status kesehatan hewan tahun 2017 meningkat 0,29% . Capaian status kesehatan hewan tahun 2017 telah mencapai 95,99% dari target tahun 2019 sebesar 80%.

Dari 34 provinsi, provinsi yang memiliki angka status kesehatan hewan tertinggi adalah provinsi Papua Barat dengan nilai 94,16% yang disebabkan telah bebasnya 4 kabupaten/kota dari penyakit Avian Influenza. Empat kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Manokwari, dan Kota Sorong. Sedangkan provinsi yang memiliki angka status kesehatan hewan terendah adalah provinsi Gorontalo sebesar 63,95%, yang disebabkan terjadinya wabah Anthrax pada tahun 2017. Selengkapnya angka status kesehatan hewan per provinsi disampaikan pada Gambar 12.



Gambar 12. Angka Status Kesehatan Hewan Per Provinsi Tahun 2017

Untuk mencapai peningkatan status kesehatan hewan didukung oleh kegiatan:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp Juta)			Output		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pengendalian dan Penanggulangan Rabies (Dosis)	45.749,76	41.267,37	90,20	1.760.100	1,440,625	81,85
2	Pengendalian dan Penanggulangan AI (Dosis)	4.174,38	3.522,03	84,37	5.557.700	5,376,542	96,74
3	Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis (Dosis)	7.403,74	6.790,54	91,72	73.663	63,171	85,76
4	Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax (Dosis)	7.430,79	6.942,60	93,43	501.913	448,057	89,72
5	Pengendalian dan Penanggulangan Hog Cholera (Dosis)	5.791,82	5.274,75	91,07	151.813	151,813	100,00
6	Pengendalian dan Penanggulangan Jembrana	400,00	398,64	99,66	1.813	1,813	100,00

	(Dosis)							
7	Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau (Ekor)	100.970,99	92.953,24	92,06	300.000	299,283	99,76	
8	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Rabies (Sampel)	5.059,00	4.569,45	90,32	10.660	10,586	99,31	
9	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Avian Influenza (Sampel)	5.790,40	5.526,91	95,44	58.028	67,843	116,91	
10	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Brucellosis (Sampel)	2.535,63	2.356,72	92,94	42.619	37,917	88,97	
11	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Anthrax (Sampel)	646,26	604,09	93,48	2.043	2.070	101,32	
12	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hog Cholera (Sampel)	1.945,14	1.886,67	96,99	6.836	10.780	157,69	
13	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Viral (Sampel)	1.624,24	1.485,17	91,44	15.901	21,953	138,06	
14	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Bakterial (Sampel)	1.009,14	979,153	97,30	8.530	9,289	108,90	
15	Penyidikan dan Pengujian Gangguan Reproduksi (Sampel)	3.995,58	3.624,06	90,70	19.538	29,015	148,51	
16	Peningkatan Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik (BLU) (Dosis)	16.234,14	11.835,33	72,90	5.960.525	5,625,040	94,37	
17	Kesiagaan Wabah PHM (Dosis)	10.842,00	7.977,19	73,58	250.285	250.000	99,89	
18	Sistim Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANNAS) (Laporan)	6.907,44	3.767,35	54,54	5	5		
19	Tenaga Harian Lepas Pelayanan Kesehatan Hewan (Orang)	32.725,00	32.222,14	98,46	1.250	1.250		

Hasil analisis efisiensi dari kegiatan pendukung ini menunjukkan nilai positif sebesar 20%.

3.2.2.5 Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan

Kegiatan peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH bertujuan untuk mewujudkan peningkatan daya saing produk hewan melalui penjaminan aman, sehat, utuh dan halal. Pencapaian kinerja kegiatan diperoleh dari rata-rata pencapaian

beberapa indikator kerja yang meliputi pencapaian penerapan higiene dan sanitasi pada unit usaha produk hewan, penerapan kehalalan pada produk hewan bagi yang dipersyaratkan, pengawasan keamanan produk hewan, dan penjaminan persyaratan kesmavet pemasukan dan pengeluaran produk hewan.

Pencapaian kinerja kegiatan peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH di tahun 2017 sebesar 68,94%, hal ini masih di bawah target yang diharapkan sebesar 72,76% atau pencapaian kinerja memenuhi 94,75% dari target yang ditetapkan. Beberapa kendala dan permasalahan yang dapat menjadi faktor dari tidak tercapainya target yang diharapkan meliputi: pengalokasian anggaran kegiatan di tahun 2017 tidak dapat dipenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan, beberapa sub-kegiatan tidak dapat tidak dapat difasilitasi teranggarkan di tahun 2017, disamping adanya aturan dan pedoman teknis yang menjadi dasar pelaksanaan belum rampung diselesaikan. Akan tetapi disisi lain, ada beberapa sub-kegiatan juga dapat melebihi target yang diharapkan (sertifikasi NKV unit usaha, penguatan kapasitas laboratorium kesmavet, pengembangan SDM pengawasan keamanan produk hewan dan juru sembelih halal). Jika dihubungkan dengan target kinerja sampai di tahun 2019, maka pencapaian di tahun 2017 telah mencapai 81,56%.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator persyaratan mutu dan keamanan produk hewan adalah:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp Juta)			Output		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Fasilitasi Peralatan RPH (Unit)	4.656,53	4.399,09	94,47	2	2	100,00
2	Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (Sampel)	2.657,10	2.414,44	90,87	9.500	15.230	160,32
3	Monitoring dan Surveillance Residu dan Cemarkan Mikroba (Sampel)	5.377,56	5.123,42	95,27	22.630	25,212	111,41
4	Penguatan Manajemen Laboratorium Kesmavet (Unit)	1.107,00	1.099,74	99,34	1	1	100,00
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesmavet (Unit)	1.566,72	1.280,03	81,70	4	4	100,00

6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lab. Kesmavet (Unit)	.,070,88	1.065,56	99,50	15	15	100,00
7	Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan Hewan (Unit)	90,10	86,83	96,37	3	3	100,00

Hasil analisis efisiensi menunjukkan bahwa kegiatan pendukung pencapaian indikator persyaratan mtu dan keamanan produk hewan efisien, dengan nilai efisiensi sebesar 17,78%. Data unit usaha yang sudah memiliki NKV disampaikan pada Lampiran 8.

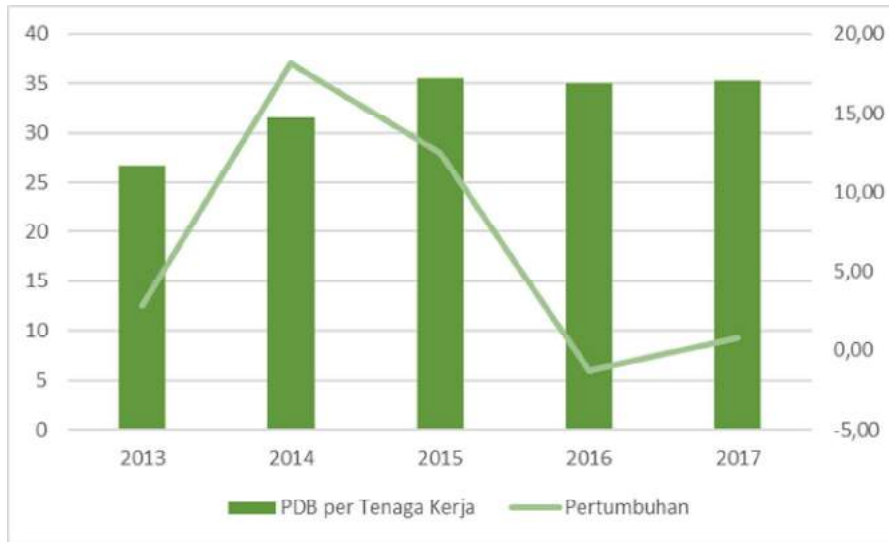
3.2.3 Sasaran Strategis 3: Peningkatan Kesejahteraan Peternak

Sasaran strategis peningkatan kesejahteraan peternak memiliki 2 (dua) indikator yaitu (1) PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan; dan (2) Nilai Tukar Peternak (NTP). Capaian indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan Kesejahteraan Peternakan disampaikan sebagai berikut:

3.2.3.1 PDB Peternakan Per Jumlah Tenaga Kerja

Data PDB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada waktu tertentu. PDB disajikan dalam dua versi, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan. Sedangkan harga konstan penilaiannya berdasarkan pada harga suatu tahun dasar tertentu. PDB Peternakan per Jumlah Tenaga Kerja diperoleh dengan cara membagi data PDB dibagi jumlah tenaga kerja sub sektor peternakan.

Capaian PDB peternakan per jumlah tenaga kerja tahun 2017 berdasarkan harga konstan sebesar Rp 35,32 juta atau 89,44% dari target Rp 39,49 juta. Dibandingkan dengan target tahun 2019, capaian tahun 2017 telah mencapai 79,96%. Dalam lima tahun terakhir nilai PDB peternakan per jumlah tenaga kerja meningkat rata-rata 6,60%. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2016. Selengkapnya nilai PDB peternakan per tenaga kerja tahun 2013-2017 disajikan pada Gambar 13.



Gambar 13. PDB Subsektor Peternakan per Tenaga Kerja Tahun 2013-2017

Capaian PDB tahun 2017 didukung oleh kegiatan:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp Juta)			Output		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Koordinasi/Pembinaan Pengembangan Pemasaran Hasil Peternakan (Laporan)	591,50	555,40	93,90	1	1	100,00
2	Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak (Unit)	532,52	526,78	98,92	1	1	100,00
3	Penguatan Kelembagaan Peternak (Laporan)	5.560,30	5.313,83	95,57	3	3	100,00
4	Koordinasi/Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Laporan)	4.520,37	4.330,66	92,91	1	1	100,00
5	Pengembangan Informasi Pasar	540,00	532,73	98,65	10	9	90,00

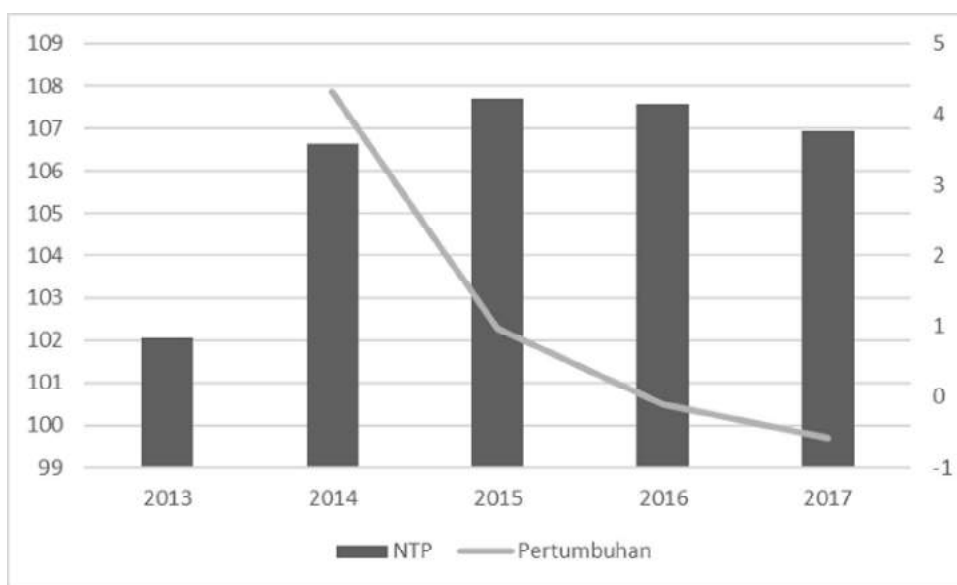
Nilai efisiensi dari capaian kegiatan pendukung PDB peternakan sebesar 3,69%. PDB sub sektor peternakan tahun 2017 disampaikan pada Lampiran 9.

3.2.3.2 NTP Peternakan

Nilai tukar petani peternak merupakan indikator proxy kesejahteraan peternak. NTPT merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima peternak (IT) dengan

indeks harga yang dibayar petani (IB). NTPT tahun 2017 sebesar 106,95, menurun 0,58% dari tahun 2016. Penurunan ini terjadi disebabkan oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) subsektor peternakan sebesar 2,14 persen lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) sebesar 2,73 persen. Selama tahun 2017 angka NTPT berfluktuatif, angka tertinggi terjadi di bulan Agustus, dan terendah pada bulan April. Selengkapnya Nilai NTPT tahun 2017 disampaikan pada Lampiran 10.

Dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 108,12, capaian NTPT tahun 2017 telah mencapai 98,92%. Nilai NTPT dalam lima tahun terakhir memiliki kecenderungan menurun, terutama untuk tahun 2016 dan 2017. Selengkapnya data NTPT tahun 2013-2017 disajikan pada gambar 14.



Gambar 14. Nilai NTP Peternakan Tahun 2013-2017

Kegiatan yang mendukung peningkatan NTPT tahun 2017 adalah:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp Juta)			Output		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Fasilitasi Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair (Unit)	250,00	248,48	99,39	1	1	100,00
2	Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan (Unit)	450,00	439,49	97,67	3	3	100,00

Nilai efisiensi kegiatan pendukung peningkatan NTPt tahun 2017 sebesar 1,72%.

3.3 Kinerja Lainnya

1. Pengelolaan Barang Milik Negara Award

Pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mendapatkan penghargaan “BMN Award” dari Menteri Pertanian. Ditjen PKH memenangkan dua kategori yaitu: (1) Kategori Penyelesaian Satker Inaktif; dan (2) Kategori Penyelesaian Administrasi Belanja Akun 526 Barang yang akan diserahkan kepada Pemda/masyarakat.

Penghargaan ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal PKH merupakan yang terbaik dalam pengelolaan aset-aset BMN dan telah sesuai dengan prinsip pengamanan aset yaitu tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

2. Standar Nasional Indonesia (SNI) Award

Pada tahun 2017, dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PKH mendapat penghargaan SNI Award dari Badan Standarisasi Nasional (BSN). Kedua UPT tersebut adalah BET Cipelang dan BBIB Singosari. BET Cipelang mendapat anugerah perunggu dalam kategori perusahaan atau organisasi kecil barang, sedangkan BBIB Singosari mendapatkan anugerah perak pada kategori perusahaan/ organisasi menengah barang sektor pangan, pertanian dan kesehatan. SNI award merupakan apresiasi tertinggi dari pemerintah kepada perusahaan atau organisasi yang konsisten dan komitmen dalam menerapkan SNI, serta mempunyai kinerja yang sangat baik

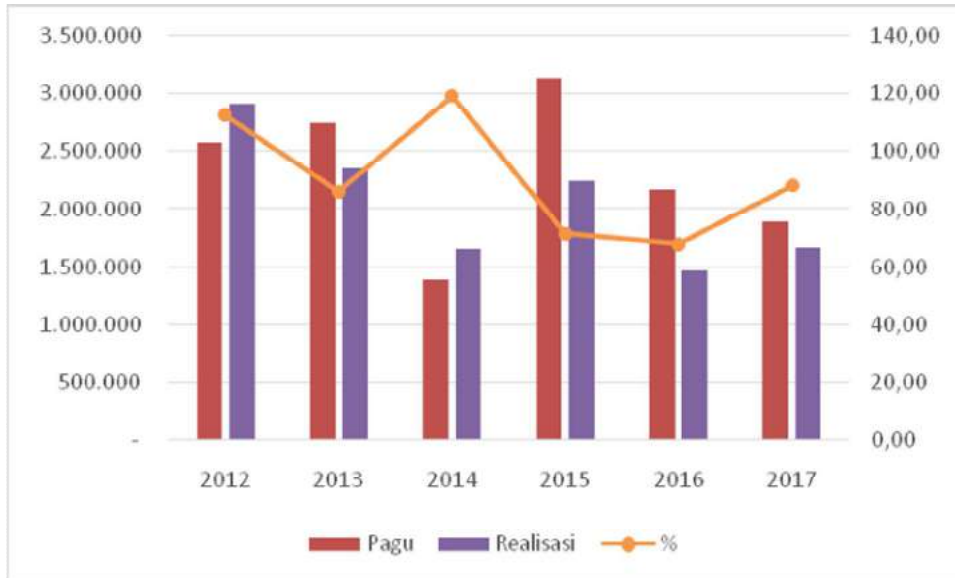
3.4 Akuntabilitas Keuangan

APBN 2017 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.1,729 triliun. Pada bulan Agustus 2017, Ditjen PKH mendapat tambahan anggaran melalui APBN-P Rp. 222,400 Milyar yang dialokasikan untuk kegiatan: (1) penguatan sarana dan prasarana hijauan pakan ternak, alat dan mesin; 92) produksi benih (Embrio Ternak Sapi

Belgian Blue); (3) Pengembangan Ternak Sapi dan Kambing UPTD Provinsi; (4) Optimalisasi Reproduksi (Sinkronisasi Hormon); dan (5) Pengendalian Penyakit Hewan. Jadi pada triwulan III, total anggaran Ditjen PKH menjadi Rp.1,880 T. Dari total anggaran tersebut besarnya alokasi dana untuk kantor pusat sebesar Rp. 225,72 miliar (11,96%), kantor daerah sebesar Rp.789,43 miliar (41,82%), Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.856,10 miliar (45,35%), Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota sebesar Rp.16,39 miliar (0,87%). Dana tersebut dialokasikan pada 60 satker dengan rincian 1 Satker Pusat, 22 Satker UPT, 34 Satker Tugas Pembantuan Provinsi, dan 3 Satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

Realisasi anggaran Ditjen PKH pada tahun 2017 sebesar Rp 1,66 triliun atau 88,18% dari pagu Rp 1,89 triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, terjadi peningkatan realisasi anggaran yang cukup tinggi pada tahun 2017 sebesar 22,93%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 terjadi pemblokiran anggaran sebesar Rp 570,25 miliar. Realisasi anggaran yang masih 88,18% disebabkan oleh beberapa kegiatan pengadaan HPT, sapi potong, dan pembayaran biaya operasional Upsus Siwab yang tidak terealisasi. Selain itu juga terjadi penurunan realisasi pada belanja pegawai yang disebabkan banyaknya pegawai yang pensiun pada tahun 2017.

Dalam kurun waktu 2012-2017 rata-rata capaian realisasi anggaran 90,95%. Pada tahun 2012 dan 2014 realisasi anggaran Ditjen PKH melebihi pagu disebabkan oleh realisasi dana hibah dijadikan sebagai realisasi anggaran. Selengkapnya pagu dan realisasi anggaran Ditjen PKH tahun 2012-2017 disajikan pada Gambar 15.



Gambar 15. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen PKH Tahun 2012-2017

a. Realisasi Per Unit Kerja

Berdasarkan alokasi anggaran Unit Kerja realisasi anggarannya sebagai berikut: 1) Kantor Pusat sebesar Rp 187,99 milyar atau tercapai 83,29% dari pagu Rp. 225,72 milyar, 2) Kantor daerah sebesar Rp. 729,94 milyar atau tercapai 92,46% dari pagu Rp.789,43 miliar, 3) TP Provinsi sebesar Rp. 730,70 milyar atau 85,35% dari pagu Rp. 856,10 milyar, 5) TP Kabupaten sebesar Rp. 15,86 milyar atau 96,71% dari pagu Rp. 16,39 milyar.

Tabel 13. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Kewenangan Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan Tahun 2017

No.	Kewenangan	Pagu (miliar)	Realisasi (miliar)	%
1	Pusat	225,72	187,99	83,29
2	Kantor Daerah	789,43	729,94	92,46
3	TP Provinsi	856,10	730,70	85,35
4	TP Kabupaten	16,39	15,86	96,71
	Total	1.887,64	1.664,49	88,18

b. Realisasi Per Jenis Belanja

Berdasarkan alokasi anggaran per jenis belanja realisasi anggarannya sebagai berikut : 1) Belanja Pegawai sebesar 96,63% atau Rp. 138,64 milyar dari pagu sebesar Rp. 143,47 milyar; 2) Belanja Barang sebesar 86,88% atau Rp. 1,37 triliun dari pagu sebesar Rp. 1,57 triliun; 3) Belanja Modal sebesar 93,02% atau Rp 160,33 milyar dari pagu sebesar Rp 172,35 milyar.

Tabel 14. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan Tahun 2017

No.	Per Jenis Belanja	Anggaran (miliar)	Realisasi (miliar)	%
1	Belanja Pegawai	143,47	138,64	96,63
2	Belanja Barang	1.571,82	1.365,53	86,88
3	Belanja Modal	172,35	160,33	93,02

c. Realisasi Per Kegiatan Utama

Realisasi anggaran per kegiatan utama antara lain: 1) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak terealisasi sebesar 88,22% atau Rp. 186,26 milyar; 2) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis terealisasi sebesar 89,59% atau Rp. 332,09 milyar; 3) Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit terealisasi sebesar 86,36% atau Rp. 818,35 milyar; 4) Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing terealisasi sebesar 88,51% atau Rp. 64,09 milyar; 5) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak terealisasi sebesar 92,35% atau Rp. 18,48 milyar; 6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terealisasi sebesar 92,24 % atau Rp. 245,22 milyar.

Tabel 15. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Kegiatan Utama Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan Tahun 2017

No.	Kegiatan Utama	Anggaran (miliar)	Realisasi (miliar)	%
1	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	211,14	186,26	88,22
2	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	370,68	332,09	89,59
3	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit	947,56	818,35	86,36
4	Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing	72,41	64,09	88,51
5	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	20,01	18,48	92,35
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	265,84	245,22	92,24

IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017 disusun sebagai sarana penyediaan dokumen bagi penilaian kinerja instansi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mencakup kinerja jajaran pusat dan daerah untuk kurun waktu tahun anggaran 2017.

Capaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017 berkisar antara 59,57-1.155%. Dari dua belas indikator kinerja, terdapat enam indikator kinerja yang capaiannya sangat berhasil (capaian >100%) yaitu Produksi Susu, Ternak bersertifikat /SKLB, Volume ekspor komoditi peternakan, Investasi subsektor peternakan PMA, Investasi subsektor peternakan PMDN, dan Status kesehatan hewan. Lima indikator kinerja yang capaiannya berhasil (80-100%) yaitu produksi daging sapi/kerbau, produksi telur, persyaratan mutu dan keamanan produk hewan, PDB peternakan per jumlah tenaga kerja dan Nilai Tukar Peternak (NTP). Sedangkan indikator kinerja yang kurang berhasil (capaian <60%) adalah produksi telur.

Berdasarkan penilain sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu Kementerian Keuangan, nilai kinerja program pembangunan PKH sebesar 89,56% dengan kategori baik. Nilai ini didukung oleh penyerapan anggaran, pencapaian keluaran, konsistensi dan efisiensi yang cukup tinggi. Efisiensi pelaksanaan program pembangunan PKH tahun 2017 bernilai positif sebesar 10,22%, yang berarti Ditjen PKH telah memanfaatkan sumber daya secara optimal dalam pencapaian sarannya. Sedangkan nilai efisiensi per indikator kinerja berkisar antara 3,01%-20%.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja pada tahun 2017 antara lain: (1) Perubahan struktur OPD yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan; (2) Perubahan target akseptor Upsus Siwab; (3) Keterlambatan pelaksanaan pengadaan; (4) Masih kurangnya sinergitas peternak-petugas IB-petugas Kab/Kota dan Provinsi; (5) Isu SABER PUNGLI yang menurunkan kinerja petugas IB; (6) Administrasi pembayaran Biaya Operasional IB, PKB, dan ATR yang belum seragam di masing-masing provinsi; (7) Proses SKSR menjadi kendala pelaksanaan kegiatan pakan dan kesmavet; (8) Keterbatasan SDM

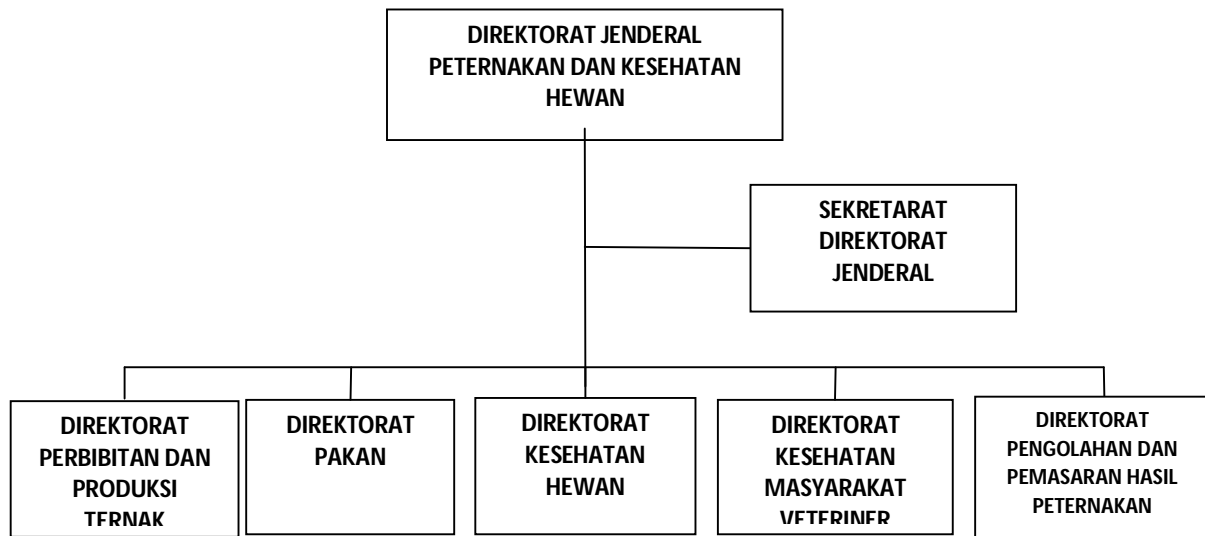
IB, PKB, ATR utamanya di Indonesia Timur; (9) Distribusi sarana dan prasarana IB; (10) Aksesibilitas lahan penanaman HPT; dan (11) Proses pengadaan yang baru dimulai di pertengahan tahun sehingga beberapa pengadaan tidak terealisasi.

Kebijakan Ditjen PKH untuk tahun 2018 adalah melanjutkan kegiatan 2017 dengan perbaikan dan penyempurnaan. Kebijakan tersebut adalah untuk mendukung peningkatan produksi dan populasi ternak (Fasilitasi penyediaan bibit dan produksi, penyediaan pakan yang berkualitas) serta penanganan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Rencana kerja tahun 2018 adalah melanjutkan upaya khusus peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau, pengadaan sapi indukan (impor), pengamanan penyakit hewan, penyelamatan betina produktif, pengelolaan pakan hijauan, produksi pakan olahan, peningkatan mutu dan keamanan pakan, produksi vaksin dan obat hewan, produksi benih (semen dan embrio), produksi bibit unggul ternak, dan pengawasan keamanan produk hewan.

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2017, dengan harapan dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sarana peningkatan kinerja guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pembelajaran untuk peningkatan.

Lampiran 1. Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015)



Sumber :Dijen PKH

Lampiran 2. Rekapitulasi SDM Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan pendidikan terakhir Tahun 2010-2017

No.	Tahun	Jenjang Pendidikan										Jumlah
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
1	2017	19	510	480	31	3	211	2	719	63	83	2121
2	2016	18	478	473	27	8	224	2	791	67	97	2.185
3	2015	20	479	471	21	10	233	2	847	75	113	2.271
4	2014	18	455	447	20	10	205	2	842	81	116	2.196
5	2013	15	458	421	17	12	184	2	844	87	120	2.160
6	2012	17	440	445	17	15	191	4	884	93	134	2.240
7	2011	17	460	461	13	19	192	4	944	97	154	2.361
8	2010	16	364	482	8	22	128	3	992	106	169	2.290

Sumber : Dijen PKH

Lampiran 3. PK DirekturJenderal PKH Tahun 2017.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
TELEPON : (021) 7815580 - 83, 78847319, FAKSIMILE : (021) 7815581 - 83, 78847319 E-MAIL : ditjennak@deptan.go.id
WEBSITE : <http://ditjennak.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Ketut Diarmita

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian

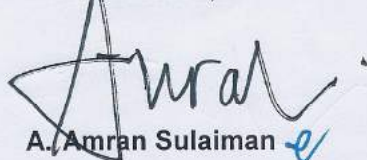
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2017

Pihak Kedua,


A. Amran Sulaiman

Pihak Pertama,


I Ketut Diarmita

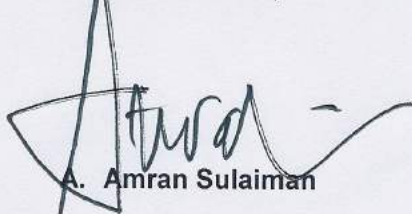
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	1) Produksi daging sapi/kerbau	639,61 Ribu Ton
		2) Produksi daging ternak lainnya	3.796,88 Ribu Ton
		3) Produksi telur	3.536,86 Ribu Ton
		4) Produksi susu	910,57 Ribu Ton
2.	Peningkatan Daya Saing Peternakan	1) Ternak bersertifikat/SKLB	2.950 Ekor
		2) Volume ekspor komoditi peternakan	4 %
		3) Investasi subsektor peternakan PMA	2 %
		Investasi subsektor peternakan PMDN	2 %
		4) Status kesehatan hewan	76 %
		5) Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan	72,76 %
3.	Peningkatan Kesejahteraan Peternak	1) PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan	39,49 Rp.Juta
		2) Nilai tukar peternak (NTP)	107,53

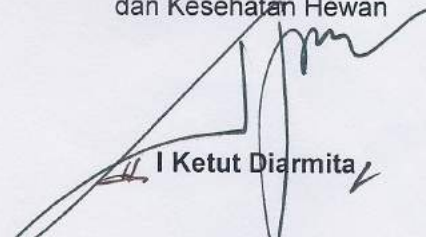
Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Rp 210.855.692.000
2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Rp 366.159.597.000
3. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	Rp 945.653.900.000
4. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH	Rp 72.409.232.000
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp 265.446.712.000
6. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Rp 20.007.285.000
Jumlah	Rp 1.880.532.418.000

Jakarta, September 2017

Menteri Pertanian,


A. Amran Sulaiman

Direktur Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan


I Ketut Diarmita

Lampiran 4. Tabel Produksi Daging, Telur dan Susu

Produksi Daging Sapi Tahun 2013 - 2017
Beef Production 2013 - 2017

(Ton)

No	Provinsi/	Tahun/Year				
	Provinces	2013	2014	2015	2016	2017 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	8.747	8.814	10.048	10.401	10.714
2	Sumatera Utara	18.437	22.656	23.408	25.571	26.862
3	Sumatera Barat	23.099	24.943	26.007	26.441	27.057
4	Riau	8.243	9.298	8.677	9.396	9.584
5	Jambi	4.386	4.329	4.654	4.386	4.479
6	Sumatera Selatan	14.496	15.281	16.689	17.879	18.196
7	Bengkulu	4.222	3.106	3.365	3.057	3.400
8	Lampung	14.099	13.074	12.337	12.609	13.150
9	Kepulauan Bangka Belitung	2.966	3.427	2.539	2.317	2.446
10	Kepulauan Riau	556	2.663	2.661	2.669	2.746
11	DKI Jakarta	18.021	19.260	20.166	23.126	24.258
12	Jawa Barat	71.881	67.073	75.478	73.319	75.124
13	Jawa Tengah	61.141	55.988	55.332	58.169	59.708
14	DI. Yogyakarta	8.637	8.611	7.584	7.783	7.884
15	Jawa Timur	100.707	97.908	95.431	101.729	103.625
16	Banten	36.676	37.672	37.164	33.473	34.496
17	Bali	8.964	7.283	7.744	7.811	7.878
18	Nusa Tenggara Barat	12.688	10.847	10.593	10.341	10.444
19	Nusa Tenggara Timur	11.083	11.656	12.299	12.442	12.719
20	Kalimantan Barat	8.077	7.274	5.532	5.306	5.675
21	Kalimantan Tengah	4.277	3.844	4.061	4.295	4.368
22	Kalimantan Selatan	9.770	8.573	7.978	7.869	8.048
23	Kalimantan Timur	9.210	8.700	9.129	8.446	8.614
24	Kalimantan Utara	-	675	614	630	661
25	Sulawesi Utara	4.565	4.587	3.611	3.431	3.450
26	Sulawesi Tengah	4.603	5.131	4.884	5.207	4.438
27	Sulawesi Selatan	14.518	17.214	19.365	18.451	19.188
28	Sulawesi Tenggara	3.849	4.374	3.693	4.413	4.497
29	Gorontalo	3.617	2.460	3.006	3.392	3.392
30	Sulawesi Barat	2.911	1.988	2.792	2.853	2.666
31	Maluku	2.687	1.592	2.110	1.994	2.061
32	Maluku Utara	876	999	1.192	1.499	1.717
33	Papua Barat	4.077	3.658	3.809	3.958	4.077
34	Papua	2.733	2.711	2.709	3.822	4.137
INDONESIA		504.818	497.670	506.661	518.484	531.757

Keterangan/Note :*) Angka sementara/Preliminary figures

Produksi Daging Kerbau Tahun 2013 - 2017
Buffalo Meat Production 2013 - 2017

(Ton)

No	Provinsi/	Tahun/Year				
	Provinces	2013	2014	2015	2016	2017 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	2.676	2.765	2.876	3.133	3.227
2	Sumatera Utara	3.395	4.170	4.194	4.659	4.970
3	Sumatera Barat	2.590	2.602	2.678	2.558	2.609
4	Riau	1.367	1.840	1.813	2.075	2.116
5	Jambi	2.809	1.982	1.768	1.692	1.742
6	Sumatera Selatan	815	840	922	977	1.028
7	Bengkulu	912	1.399	906	449	481
8	Lampung	262	252	287	253	205
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	4	4	2	2
10	Kepulauan Riau	1	2	2	-	-
11	DKI Jakarta	48	34	92	67	67
12	Jawa Barat	3.405	1.970	3.117	3.381	2.466
13	Jawa Tengah	2.257	2.202	2.370	1.792	1.785
14	DI. Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	120	159	94	94	96
16	Banten	7.553	7.137	6.900	3.339	3.688
17	Bali	17	23	18	28	28
18	Nusa Tenggara Barat	3.187	1.727	1.465	1.421	1.435
19	Nusa Tenggara Timur	1.290	1.290	1.482	1.504	1.510
20	Kalimantan Barat	78	49	55	65	66
21	Kalimantan Tengah	45	56	67	49	50
22	Kalimantan Selatan	825	691	680	822	839
23	Kalimantan Timur	87	64	36	41	42
24	Kalimantan Utara	-	12	35	22	23
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	29	45	44	44	44
27	Sulawesi Selatan	3.413	3.546	2.981	2.969	3.266
28	Sulawesi Tenggara	10	10	39	31	35
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	146	135	205	198	200
31	Maluku	429	155	198	160	160
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	63	75	79	79	79
INDONESIA		37.837	35.237	35.410	31.905	32.260

Keterangan/Note : *) Angka sementara/Preliminary figures

Produksi Daging Kambing Tahun 2013 - 2017
Mutton Production 2013 - 2017

(Ton)

No	Provinsi/	Tahun/Year				
	Provinces	2013	2014	2015	2016	2017 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	2.229	3.012	2.604	2.786	2.870
2	Sumatera Utara	3.470	3.538	3.546	3.959	3.983
3	Sumatera Barat	646	669	686	692	789
4	Riau	550	620	648	652	665
5	Jambi	721	689	658	760	1.127
6	Sumatera Selatan	2.222	1.532	1.300	1.395	1.486
7	Bengkulu	247	436	547	258	274
8	Lampung	2.466	2.023	1.807	2.108	2.100
9	Kepulauan Bangka Belitung	101	96	94	56	53
10	Kepulauan Riau	90	281	329	344	361
11	DKI Jakarta	1.263	1.133	870	1.110	1.156
12	Jawa Barat	7.160	7.883	8.476	7.384	7.271
13	Jawa Tengah	10.211	11.174	11.051	11.669	12.162
14	DI. Yogyakarta	1.490	1.483	1.598	1.653	1.706
15	Jawa Timur	15.499	16.622	16.465	17.950	18.399
16	Banten	3.246	2.574	3.499	2.298	2.677
17	Bali	1.679	1.728	2.599	3.403	3.428
18	Nusa Tenggara Barat	391	213	184	222	249
19	Nusa Tenggara Timur	3.630	3.727	1.733	1.763	1.832
20	Kalimantan Barat	515	276	264	358	401
21	Kalimantan Tengah	339	315	344	205	206
22	Kalimantan Selatan	663	654	565	551	445
23	Kalimantan Timur	409	533	441	499	514
24	Kalimantan Utara	-	35	43	42	44
25	Sulawesi Utara	393	395	397	243	246
26	Sulawesi Tengah	2.460	1.510	1.608	2.861	2.844
27	Sulawesi Selatan	1.591	955	971	1.039	1.123
28	Sulawesi Tenggara	265	124	317	318	335
29	Gorontalo	178	68	158	198	199
30	Sulawesi Barat	273	272	503	211	217
31	Maluku	450	203	170	342	317
32	Maluku Utara	35	28	99	122	132
33	Papua Barat	155	156	157	158	159
34	Papua	132	185	216	234	257
INDONESIA		65.169	65.142	64.948	67.845	70.024
Keterangan/Note : *) Angka sementara/Preliminary figures						

Produksi Daging Domba Tahun 2013 - 2017
Lamb Production 2013 - 2017

(Ton)

No	Provinsi/	Tahun/Year				
	Provinces	2013	2014	2015	2016	2017 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	357	440	494	795	818
2	Sumatera Utara	1.853	1.887	1.890	2.411	2.439
3	Sumatera Barat	6	6	7	7	7
4	Riau	10	13	16	16	16
5	Jambi	149	138	136	180	159
6	Sumatera Selatan	334	191	185	194	210
7	Bengkulu	12	45	57	11	12
8	Lampung	76	49	55	47	51
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	-	0	1	1
10	Kepulauan Riau	-	-	-	0	-
11	DKI Jakarta	422	182	135	164	171
12	Jawa Barat	21.867	23.758	22.668	23.283	31.390
13	Jawa Tengah	5.356	6.030	5.906	6.082	6.447
14	DI. Yogyakarta	2.188	2.306	2.304	2.535	2.578
15	Jawa Timur	5.341	5.783	5.704	7.291	7.473
16	Banten	3.044	2.336	4.605	2.502	2.655
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	19	0	1	1	1
19	Nusa Tenggara Timur	375	379	311	312	315
20	Kalimantan Barat	0	-	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	4	10	9	4	0
22	Kalimantan Selatan	19	5	8	11	11
23	Kalimantan Timur	5	3	1	1	1
24	Kalimantan Utara	-	-	-	0	0
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	23	24	21	33	28
27	Sulawesi Selatan	1	1	1	-	-
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	27	24	10	33	33
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	-	0	-	-	-
INDONESIA		41.487	43.612	44.525	45.912	54.818

Keterangan/Note : *) Angka sementara/Preliminary figures

Produksi Daging Babi Tahun 2013 - 2017
Pork Production 2013 - 2017

(Ton)

No	Provinsi/	Tahun/ Year				
	Provinces	2013	2014	2015	2016	2017 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	44	37	25	28	29
2	Sumatera Utara	39.212	40.907	42.030	41.902	43.262
3	Sumatera Barat	505	524	544	552	566
4	Riau	822	2.128	2.059	1.128	1.150
5	Jambi	219	948	726	583	322
6	Sumatera Selatan	566	355	466	716	766
7	Bengkulu	28	60	37	-	-
8	Lampung	582	803	496	925	875
9	Kepulauan Bangka Belitung	675	688	536	611	641
10	Kepulauan Riau	17.069	16.790	18.477	10.969	11.841
11	DKI Jakarta	8.655	6.890	6.245	8.154	8.494
12	Jawa Barat	977	1.456	1.445	2.335	1.098
13	Jawa Tengah	1.675	1.316	1.376	1.291	1.365
14	DI. Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	3.136	3.159	3.073	3.580	3.669
16	Banten	1.020	1.225	2.211	1.895	1.895
17	Bali	123.219	124.638	150.959	166.535	169.766
18	Nusa Tenggara Barat	558	117	137	139	142
19	Nusa Tenggara Timur	32.217	32.501	32.726	32.682	33.856
20	Kalimantan Barat	26.336	27.877	22.425	18.059	16.176
21	Kalimantan Tengah	2.434	1.549	2.074	1.912	1.938
22	Kalimantan Selatan	135	62	54	42	43
23	Kalimantan Timur	1.509	1.085	1.009	824	840
24	Kalimantan Utara	-	488	496	517	536
25	Sulawesi Utara	19.141	19.708	21.493	21.906	22.294
26	Sulawesi Tengah	2.380	3.083	2.962	5.452	4.967
27	Sulawesi Selatan	3.938	4.128	4.126	4.342	4.776
28	Sulawesi Tenggara	525	284	379	422	483
29	Gorontalo	88	117	137	34	35
30	Sulawesi Barat	342	335	708	702	696
31	Maluku	2.799	573	631	919	882
32	Maluku Utara	102	82	175	209	266
33	Papua Barat	1.265	1.701	1.721	1.763	1.793
34	Papua	6.267	6.672	8.253	8.479	8.783
INDONESIA		298.440	302.287	330.213	339.609	344.247
Keterangan/Note : *) Angka sementara/Preliminary figures						

Produksi Daging Ayam Buras Tahun 2013 - 2017
Native Chicken Meat Production 2013 - 2017

(Ton)

No	Provinsi/	Tahun/Year				
	Provinces	2013	2014	2015	2016	2017 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	12.694	12.452	10.870	11.235	12.021
2	Sumatera Utara	18.435	16.648	16.905	17.831	18.559
3	Sumatera Barat	6.027	6.165	6.293	6.418	6.566
4	Riau	3.302	4.044	5.614	4.179	4.262
5	Jambi	8.411	5.791	7.788	6.596	6.873
6	Sumatera Selatan	7.068	8.961	9.607	9.949	10.575
7	Bengkulu	480	398	394	382	654
8	Lampung	13.641	11.114	11.972	11.260	13.242
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.265	1.832	1.295	2.040	1.916
10	Kepulauan Riau	892	540	1.098	1.198	1.307
11	DKI Jakarta	33.376	2.598	2.912	9.053	9.506
12	Jawa Barat	27.149	26.553	25.208	25.643	24.059
13	Jawa Tengah	44.066	44.717	34.988	31.603	31.215
14	DI. Yogyakarta	5.496	6.160	6.035	6.034	6.200
15	Jawa Timur	38.577	37.199	35.885	31.567	32.356
16	Banten	8.875	9.919	20.688	6.779	8.421
17	Bali	4.686	4.681	4.631	4.486	4.514
18	Nusa Tenggara Barat	5.914	6.922	7.180	8.765	9.165
19	Nusa Tenggara Timur	11.435	11.527	11.332	11.415	11.456
20	Kalimantan Barat	13.524	8.109	4.891	3.746	3.899
21	Kalimantan Tengah	2.125	2.018	1.903	1.830	1.873
22	Kalimantan Selatan	5.978	5.362	3.873	3.857	3.828
23	Kalimantan Timur	7.882	4.739	5.043	5.272	5.377
24	Kalimantan Utara	-	1.335	1.521	1.556	1.711
25	Sulawesi Utara	2.443	2.541	2.561	2.597	2.630
26	Sulawesi Tengah	8.526	9.069	9.386	5.736	6.075
27	Sulawesi Selatan	6.331	25.838	28.099	31.524	34.676
28	Sulawesi Tenggara	10.136	8.375	9.248	9.591	10.080
29	Gorontalo	1.513	1.471	1.516	1.586	1.616
30	Sulawesi Barat	4.959	4.951	5.063	4.792	4.876
31	Maluku	415	251	300	266	288
32	Maluku Utara	862	942	928	1.074	1.039
33	Papua Barat	1.022	1.176	1.200	1.276	1.333
34	Papua	2.094	3.254	3.546	3.853	4.020
INDONESIA		319.601	297.653	299.773	284.988	296.189
Keterangan/Note : *) Angka sementara/Preliminary figures						

Produksi Daging Ayam Ras Petelur Tahun 2013 - 2017
Layer Meat Production 2013 - 2017

(Ton)

No	Provinsi/	Tahun/ Year				
	Provinces	2013	2014	2015	2016	2017 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	196	169	274	331	354
2	Sumatera Utara	11.074	10.463	10.724	11.135	11.185
3	Sumatera Barat	6.218	6.126	6.158	6.082	6.124
4	Riau	24	502	1.262	499	509
5	Jambi	634	2.098	2.118	2.192	1.635
6	Sumatera Selatan	4.764	4.537	4.610	4.647	4.791
7	Bengkulu	26	25	44	57	65
8	Lampung	1.990	2.699	1.877	2.256	2.469
9	Kepulauan Bangka Belitung	22	43	75	68	77
10	Kepulauan Riau	307	285	352	491	683
11	DKI Jakarta	541	1.337	1.368	1.832	1.923
12	Jawa Barat	7.512	7.453	7.524	10.031	9.294
13	Jawa Tengah	9.365	9.222	8.677	8.570	9.890
14	DI. Yogyakarta	2.599	3.028	3.635	3.793	3.876
15	Jawa Timur	18.552	25.726	30.312	33.106	33.933
16	Banten	2.148	3.905	4.200	4.786	4.874
17	Bali	2.372	2.373	2.708	3.004	3.031
18	Nusa Tenggara Barat	147	218	256	358	375
19	Nusa Tenggara Timur	34	34	34	34	35
20	Kalimantan Barat	2.496	3.411	2.738	2.367	2.599
21	Kalimantan Tengah	41	21	35	25	28
22	Kalimantan Selatan	1.529	3.143	2.202	2.247	2.343
23	Kalimantan Timur	553	310	436	380	387
24	Kalimantan Utara	-	20	22	12	13
25	Sulawesi Utara	837	852	1.075	1.123	1.127
26	Sulawesi Tengah	663	776	732	945	1.886
27	Sulawesi Selatan	1.891	7.679	8.488	8.806	9.246
28	Sulawesi Tenggara	108	116	148	216	273
29	Gorontalo	237	270	275	271	272
30	Sulawesi Barat	75	75	108	116	123
31	Maluku	4	7	7	14	16
32	Maluku Utara	38	16	14	21	33
33	Papua Barat	46	51	54	56	58
34	Papua	91	205	263	411	461
INDONESIA		77.135	97.195	102.804	110.282	113.989

Keterangan/Note : *) Angka sementara/Preliminary figures

Produksi Daging Ayam Ras Pedaging Tahun 2013 - 2017
Broiler Meat Production 2013 - 2017

(Ton)

No	Provinsi/	Tahun/ Year				
	Provinces	2013	2014	2015	2016	2017 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	4.045	4.421	6.107	6.429	7.282
2	Sumatera Utara	37.836	38.752	40.902	42.815	43.389
3	Sumatera Barat	16.704	19.493	20.063	20.438	20.395
4	Riau	42.557	40.732	45.308	47.575	48.527
5	Jambi	15.861	13.793	13.075	12.599	12.860
6	Sumatera Selatan	30.447	29.997	33.318	36.357	37.376
7	Bengkulu	2.079	1.706	1.579	4.735	5.194
8	Lampung	41.623	32.237	33.354	33.786	37.161
9	Kepulauan Bangka Belitung	14.194	16.714	14.838	15.657	16.280
10	Kepulauan Riau	7.291	8.633	8.586	8.726	8.868
11	DKI Jakarta	129.206	102.794	129.315	138.088	142.284
12	Jawa Barat	563.529	543.765	530.423	719.820	622.322
13	Jawa Tengah	123.726	130.357	158.673	187.965	191.234
14	DI. Yogyakarta	32.581	37.367	35.536	34.627	34.974
15	Jawa Timur	162.892	198.016	203.139	219.833	225.329
16	Banten	109.029	96.554	73.488	87.217	89.799
17	Bali	7.826	8.888	10.454	9.866	9.939
18	Nusa Tenggara Barat	4.553	8.562	8.257	6.835	7.075
19	Nusa Tenggara Timur	631	650	2.387	4.298	4.395
20	Kalimantan Barat	18.595	31.690	44.436	40.778	45.034
21	Kalimantan Tengah	7.338	10.912	11.487	12.278	12.646
22	Kalimantan Selatan	55.032	46.511	60.952	72.553	74.080
23	Kalimantan Timur	35.772	43.641	53.860	56.532	57.662
24	Kalimantan Utara	-	3.393	6.623	4.249	7.966
25	Sulawesi Utara	5.468	5.489	7.195	7.310	7.346
26	Sulawesi Tengah	8.070	8.177	7.613	8.854	10.081
27	Sulawesi Selatan	11.368	50.829	53.664	48.862	51.305
28	Sulawesi Tenggara	4.486	3.559	3.601	3.337	3.707
29	Gorontalo	577	1.450	2.658	3.900	3.941
30	Sulawesi Barat	1.678	1.683	1.718	1.429	1.454
31	Maluku	8	10	67	65	69
32	Maluku Utara	65	374	421	531	480
33	Papua Barat	525	1.025	1.599	1.300	1.442
34	Papua	2.284	2.204	3.610	5.856	6.168
INDONESIA		1.497.874	1.544.379	1.628.307	1.905.497	1.848.061
Keterangan/Note : *) Angka sementara/Preliminary figures						

Produksi Daging Itik Tahun 2013 - 2017
Duck Meat Production 2013 - 2017

(Ton)

No	Provinsi/	Tahun/ Year				
	Provinces	2013	2014	2015	2016	2017 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	1.476	1.540	1.146	1.647	1.948
2	Sumatera Utara	2.082	2.039	2.184	2.268	2.429
3	Sumatera Barat	687	715	728	750	761
4	Riau	204	283	293	266	272
5	Jambi	158	656	562	989	994
6	Sumatera Selatan	1.289	1.648	1.954	2.013	2.091
7	Bengkulu	31	35	37	36	56
8	Lampung	297	230	453	489	538
9	Kepulauan Bangka Belitung	46	73	66	59	63
10	Kepulauan Riau	76	50	22	22	22
11	DKI Jakarta	1.424	1.888	2.341	2.602	2.732
12	Jawa Barat	5.569	5.029	5.204	7.099	6.620
13	Jawa Tengah	3.394	3.533	3.603	3.380	3.663
14	DI. Yogyakarta	453	492	606	501	488
15	Jawa Timur	4.855	5.648	5.973	7.386	7.570
16	Banten	4.195	2.456	2.119	4.895	4.963
17	Bali	342	344	364	345	351
18	Nusa Tenggara Barat	682	653	690	702	727
19	Nusa Tenggara Timur	175	183	187	182	184
20	Kalimantan Barat	525	459	265	213	265
21	Kalimantan Tengah	143	148	140	146	150
22	Kalimantan Selatan	2.032	1.668	1.971	1.687	1.796
23	Kalimantan Timur	92	82	80	79	81
24	Kalimantan Utara	-	15	18	12	12
25	Sulawesi Utara	96	97	91	93	96
26	Sulawesi Tengah	340	354	375	383	403
27	Sulawesi Selatan	738	2.224	2.444	2.655	2.867
28	Sulawesi Tenggara	254	163	204	238	270
29	Gorontalo	31	36	40	39	40
30	Sulawesi Barat	270	258	277	220	226
31	Maluku	77	72	298	342	347
32	Maluku Utara	41	37	42	47	47
33	Papua Barat	20	33	34	35	35
34	Papua	36	37	44	45	49
INDONESIA		32.129	33.178	34.854	41.867	43.156
Keterangan/ Note : *) Angka sementara/ Preliminary figures						

Produksi Telur Tahun 2013 - 2017
Egg Production 2013 - 2017

(Ton)

No	Provinsi/	Tahun/ Year				
	Provinces	2013	2014	2015	2016	2017 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	16.269	16.077	14.648	17.151	19.492
2	Sumatera Utara	167.785	159.946	164.142	170.613	172.823
3	Sumatera Barat	78.026	76.449	78.024	77.207	77.941
4	Riau	5.808	4.757	4.910	6.273	6.399
5	Jambi	18.010	17.077	19.264	19.611	19.902
6	Sumatera Selatan	67.284	65.773	68.124	68.965	71.303
7	Bengkulu	2.527	2.478	2.920	3.133	4.351
8	Lampung	66.209	62.952	49.377	51.893	57.695
9	Kepulauan Bangka Belitung	3.616	3.559	3.407	3.237	3.409
10	Kepulauan Riau	4.472	3.783	4.526	6.013	8.064
11	DKI Jakarta	166	155	181	162	166
12	Jawa Barat	212.721	213.285	211.356	224.278	231.067
13	Jawa Tengah	284.300	274.426	278.908	296.404	303.720
14	DI. Yogyakarta	34.047	36.527	37.733	38.102	38.246
15	Jawa Timur	343.015	348.415	448.020	509.229	520.432
16	Banten	77.416	65.013	76.219	84.610	88.402
17	Bali	43.837	43.730	48.017	53.342	53.868
18	Nusa Tenggara Barat	11.074	12.424	19.139	22.053	22.973
19	Nusa Tenggara Timur	7.308	7.425	7.392	7.540	7.583
20	Kalimantan Barat	26.793	50.004	38.134	33.791	36.286
21	Kalimantan Tengah	4.560	5.098	5.132	5.637	6.051
22	Kalimantan Selatan	72.982	85.395	97.807	100.483	102.728
23	Kalimantan Timur	15.296	9.286	11.628	10.813	11.029
24	Kalimantan Utara	-	1.401	1.519	1.383	1.520
25	Sulawesi Utara	12.816	13.188	13.699	14.268	14.367
26	Sulawesi Tengah	13.458	14.981	14.887	15.803	25.710
27	Sulawesi Selatan	108.046	130.038	143.626	154.232	163.922
28	Sulawesi Tenggara	10.266	8.001	9.347	10.648	11.871
29	Gorontalo	3.829	4.185	4.327	4.376	4.414
30	Sulawesi Barat	6.679	6.505	7.117	6.503	6.696
31	Maluku	4.540	3.839	4.807	4.267	4.449
32	Maluku Utara	1.040	988	825	972	1.046
33	Papua Barat	1.438	1.699	1.801	1.887	1.953
34	Papua	2.690	3.851	4.655	6.338	6.995
INDONESIA		1.728.323	1.752.711	1.895.618	2.031.217	2.106.872
Keterangan/Note : *) Angka sementara/Preliminary figures						

Produksi Susu Segar Tahun 2013 - 2017
Fresh Milk Production 2013 - 2017

(Ton)


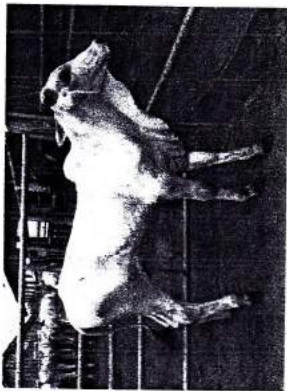
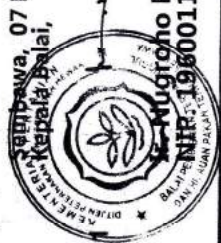
No	Provinsi/	Tahun/ Year				
	Provinces	2013	2014	2015	2016	2017 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	38	140	94	89	103
2	Sumatera Utara	1.369	783	776	1.014	1.197
3	Sumatera Barat	1.685	1.032	1.299	1.363	1.458
4	Riau	151	81	79	75	76
5	Jambi	18	18	8	7	7
6	Sumatera Selatan	325	95	124	127	130
7	Bengkulu	265	275	274	184	208
8	Lampung	216	223	678	669	705
9	Kepulauan Bangka Belitung	600	19	83	100	114
10	Kepulauan Riau	-	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	5.265	5.170	4.769	4.726	4.869
12	Jawa Barat	255.548	258.999	249.947	302.559	293.356
13	Jawa Tengah	97.579	98.494	95.513	99.997	106.938
14	DI. Yogyakarta	4.912	5.870	6.187	6.226	6.397
15	Jawa Timur	416.419	426.254	472.213	492.461	501.325
16	Banten	72	20	17	18	14
17	Bali	179	122	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	28	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	37	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	259	42	35	43	45
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	135	281	162	126	127
23	Kalimantan Timur	41	118	121	148	156
24	Kalimantan Utara	-	3	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	1.652	2.635	2.727	2.752	2.794
28	Sulawesi Tenggara	-	13	18	28	51
29	Gorontalo	16	15	-	-	-
30	Sulawesi Barat	65	47	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	24	24
INDONESIA		786.871	800.751	835.125	912.735	920.093

Keterangan/Note : *) Angka sementara/ Preliminary figures

Lampiran 5. Nilai Efisiensi Masing-Masing Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	TVK	RVK	%	Harga Satuan (Pagu/TVK)	Harga Total seharusnya (Harga Satuan * RVK)	Efisiensi ((Harga Total Seharusnya - Realisasi)/Harga Total Seharusnya) *100%
Produksi Daging Sapi/Kerbau										
1	Pengembangan Padang Pengembalaan (Pastura) di UPT	9.119.784.000	8.449.133.963	92,65	752	755	100,40	12.127.372	9.156.166.117	
2	Pengembangan Kebun HPT di UPT	11.989.791.000	11.614.569.205	96,87	511	518	101,37	23.463.387	12.154.034.712	
3	Sarana Penembangan Pakan dan HPT di UPT	3.067.900.000	3.031.460.025	98,81	183	198	108,20	16.764.481	3.319.367.213	
4	Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas	112.399.593.000	94.583.359.377	84,15	98.873.476	80.284.186	81,20	1.137	91.267.245.735	
5	Penguatan Pakan Tambahan untuk Ternak Gajanan Reproduksi	19.891.360.000	17.137.675.599	86,16	3.157	2.896	91,73	6.300.716	18.246.873.158	
6	Pengembangan Pakan Konsentrat di UPT	37.754.611.000	36.970.611.465	97,92	7.774	7.752	99,72	4.856.523	37.647.367.491	
7	Pemilihan Mutu Pakan dan Sertifikasi Pakan	1.126.311.000	1.124.249.620	99,82	2.000	4.025	201,25	563.156	2.266.700.888	
8	Penguatan Sarana dan Prasarana Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Sapi Potong	4.398.400.000	4.322.626.101	98,28	3	2	66,67	1.466.133.333	2.932.266.667	
9	Pengembangan Populasi Sapi Potong	40.947.907.000	38.032.907.654	92,88	147	143	97,28	278.557.190	39.833.678.238	
10	Pengembangan Populasi Kerbau	1.464.200.000	1.365.946.000	93,29	5	5	100,00	292.840.000	1.464.200.000	
11	Optimalisasi Reproduksi	622.422.375.000	522.477.579.599	83,94	4.000.000	3.976.470	99,41	155.606	618.760.975.379	
12	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Potong	22.485.809.000	21.570.598.865	95,93	3.899	4.884	125,26	5.767.071	28.166.373.726	
13	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Kerbau	1.456.508.000	1.271.912.750	87,33	373	75	20,11	3.904.847	292.863.539	
14	Peningkatan Kualitas Semen Beku	9.386.494.000	9.195.838.573	97,97	2.200.000	2.318.999	105,41	4.267	9.894.213.727	
15	Peningkatan Kualitas Semen Beku (BLU)	11.028.000.000	10.751.205.410	97,49	2.375.000	1.914.877	80,63	4.643	8.891.479.392	
16	Peningkatan Produksi Embrio Ternak	2.628.810.000	2.407.165.693	91,58	800	877	109,63	3.285.013	2.881.632.963	
17	Fasilitas Bangunan RPH	10.252.800.000	9.838.731.428	95,96	3	2	66,67	3.417.600.000	6.835.200.000	
18	Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif	30.729.408.000	25.059.776.367	81,55	40	40	100,00	768.235.200	30.729.408.000	
			819.405.347.694						924.740.646.943	12,86
Produksi Daging Ternak Lainnya										
Produksi daging kambing dan domba										
1	Pengembangan Populasi Kambing	430.000.000	428.960.000	99,76	2	2	100,00	215.000.000	430.000.000	
2	Pengembangan Populasi Domba	577.150.000	500.810.000	86,77	3	3	100,00	192.383.333	577.150.000	
3	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Kambing	725.638.000	713.356.242	98,31	1150	1237	107,57	630.990	780.534.092	
Produksi daging babi										
4	Pengembangan Populasi Babi	1.425.875.000	1.397.643.092	98,02	10	10	100,00	142.587.500	1.425.875.000	
5	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Babi	278.100.000	194.246.200	69,85	730	710	97,26	380.959	270.480.822	
Produksi daging unggas										
6	Pengembangan Populasi Itik	756.200.000	706.555.000	93,43	25	25	100,00	30.248.000	756.200.000	
7	Pengembangan Populasi Ayam Lokal	7.940.628.000	4.787.044.901	60,29	275	271	98,55	28.875.011	7.825.127.956	
8	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Ayam	1.717.586.000	1.098.936.659	63,98	190.100	317.048	166,78	9.035	2.864.582.883	
9	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Itik	694.106.000	675.753.950	97,36	413.889	354.818	85,73	1.677	595.014.914	
		14.545.283.000	10.503.306.044						15.524.992.668	20,00
Produksi Telur										
1	Pengembangan Populasi Itik	756.200.000	706.555.000	93,43	25	25	100,00	30.248.000	756.200.000	
2	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Itik	694.106.000	675.753.950	97,36	413.889	354.818	85,73	1.677	595.014.914	
3	Pengembangan Populasi Ayam Lokal	7.940.628.000	4.787.044.901	60,29	275	271	98,55	28.875.011	7.825.127.956	
4	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Ayam	1.717.586.000	1.098.936.659	63,98	190.100	317.048	166,78	9.035	2.864.582.883	
			7.268.290.510						12.040.952.754	20,00
Produksi Susu										
1	Pengembangan Populasi Sapi Perah	3.945.520.000	3.641.890.900	92,30	7	7	100,00	563.645.714	3.945.520.000	
2	Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Perah	2.529.995.000	2.526.462.250	99,86	1.350	1.404	104,00	1.874.070	2.631.194.800	
			6.168.353.150						6.576.714.800	6,21
Ternak bersertifikat/SKLB										
Pengembangan SDGK dan Peningkatan Mutu										
1	Genetik Ternak (KD/KP)	371.000.000	199.616.441	53,80	9	8	88,89	41.222.222	329.777.778	
2	Pendampingan Pembibitan di Masyarakat	1.030.230.000	818.184.048	79,42	96	90	93,75	10.731.563	965.840.625	
			1.017.800.489						1.295.618.403	20,00
Volume Ekspor Ternak dan Produk Hewan										
1	Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	5.843.500.000	5.707.652.751	97,68	1.600	2.337	146,06	3.652.188	8.535.162.188	
2	Fasilitas PNBP Pengujian Obat Hewan	1.604.952.000	1.338.080.940	83,37	2	2	100,00	802.476.000	1.604.952.000	
3	Peningkatan Daya Saing Hasil Peternakan	200.000.000	195.904.600	97,95	1	1	100,00	200.000.000	200.000.000	
			7.241.638.291						10.340.114.188	20
Investasi Subsektor peternakan										
1	Koordinasi/Pembinaan Investasi Peternakan	487.600.000	435.016.076	89	1	1	100	487.600.000	487.600.000	
2	Peningkatan Daya Saing Hasil Peternakan	200.000.000	195.904.600	98	1	1	100	200.000.000	200.000.000	
			630.920.676						687.600.000	8,24
Status kesehatan hewan										
1	Pengendalian dan Penanggulangan Rabies	45.749.755.000	41.267.369.194	90,20	1.760.100	1.440.625	81,85	25.993	37.445.736.490	
2	Pengendalian dan Penanggulangan AI	4.174.380.000	3.522.025.600	84,37	5.557.700	5.376.542	96,74	751	4.038.312.502	
3	Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis	7.403.742.000	6.790.541.289	91,72	73.663	63.171	85,76	100.508	6.349.209.645	
4	Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax	7.430.792.000	6.942.595.518	93,43	501.973	448.057	89,27	14.805	6.633.457.135	
5	Pengendalian dan Penanggulangan Hoq Cholera	5.791.815.000	5.274.753.206	91,07	151.813	151.813	100,00	38.151	5.791.815.000	
6	Pengendalian dan Penanggulangan Jembrana	400.000.000	398.640.000	99,66	1.813	1.813	100,00	220.629	400.000.000	
7	Pengendalian dan Penanggulangan Reproduksi pada Sapi/Kerbau	100.970.988.000	92.953.237.170	92,06	300.000	299.283	99,76	336.570	100.729.667.339	
8	Penyidikan dan Pengujian Penyakit rabies	5.058.999.000	4.569.445.844	90,32	10.660	10.586	99,31	474.578	5.023.880.245	
9	Penyidikan dan Pengujian Penyakit AI	5.790.398.000	5.526.099.806	95,44	58.028	67.843	116,91	99.786	6.769.800.295	
10	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Brucellosis	2.535.630.000	2.356.716.611	92,94	42.619	37.917	88,97	59.495	2.255.883.120	
11	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Anthrax	646.260.000	604.092.038	93,48	2.043	2.070	101,32	316.329	654.800.881	
12	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hoq Cholera	1.945.142.000	1.886.666.019	96,99	6.836	10.780	157,69	284.544	3.067.383.084	
13	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Viral	1.624.240.000	1.485.169.481	91,44	15.901	21.953	138,06	102.147	2.242.433.854	
14	Penyidikan dan Pengujian Penyakit Bakterial	1.009.144.000	979.152.827	97,03	8.530	9.289	108,90	118.305	1.098.937.704	
15	Penyidikan dan Pengujian Gajanan Reproduksi	3.995.575.000	3.624.064.156	90,70	20	29	148,51	204.502.764	5.933.647.693	
Peningkatan Produksi Obat Hewan dan Bahan										
16	Biologis (BLU)	16.234.141.000	11.835.332.851	72,90	5.960.525	5.625.040	94,37	2.724	15.320.410.952	
17	Kesediaan Wahah PHM	10.842.000.000	7.977.188.059	73,58	250.285	250.000	99,89	43.319	10.829.654.194	
18	Sistem Kesehatan Hewan Nasional	6.907.440.000	3.767.346.238	54,54	5	5	100,00	1.381.488.000	6.907.440.000	
19	Tenaga harian Lepas Pelayanan Kesehatan	32.725.000.000	32.222.135.100	98,46	1.250	1.250	100,00	26.180.000	32.725.000.000	
			233.982.571.007						254.217.469.535	7,96
Persyaratan mutu dan keamanan produk										
1	Fasilitas peralatan RPH	4.656.527.000	4.399.091.096	94,47	2	2	100,00	2.328.263.500	4.656.527.000	
2	Pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan	2.657.101.000	2.414.439.310	90,87	9.500	15.230	160,32	279.695	4.259.752.445	
3	Monitoring dan surveillance residu dan cemaran	5.377.560.000	5.123.416.392	95,27	22.630	25.212	111,41	237.630	5.991.119.873	
4	Penguatan manajemen laboratorium kesnawet	1.107.008.000	1.099.736.474	99,34	1	1	100,00	1.107.008.000	1.107.008.000	
Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium kesnawet										
5	Kesnawet	1.566.721.000	1.280.032.250	81,70	4	4	100,00	391.680.250	1.566.721.000	
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lab	1.070.875.000	1.065.555.695	99,50	15	16	106,67	71.391.667	1.142.266.667	
7	Penerapan Kesrawan pada Unit Pemeliharaan	90.100.000	86.830.500	96,37	3	3	100,00	30.033.333	90.100.000	
			15.469.101.717						18.813.494.985	17,78
PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan										
Koordinasi/Pembinaan Pengembangan										
1	Pemasaran Hasil Peternakan	591.500.000	555.398.937	93,90	1	1	100,00	591.500.000	591.500.000	
2	Fasilitas Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak	532.515.000	526.776.950	98,92	1	1	100,00	532.515.000	532.515.000	
3	Penguatan Kelembagaan Peternak	5.560.300.000	5.313.825.515	95,57	3	3	100,00	1.853.433.333	5.560.300.000	
Koordinasi/Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan										
4	Pemasaran Hasil Peternakan	4.520.370.000	4.330.657.985	95,80	4	4	100,00	1.130.092.500	4.520.370.000	
5	Pengembangan Informasi Pasar	540.000.000	532.732.800	98,65	10	9	90,00	54.000.000	486.000.000	
			11.259.392.187						11.690.685.000	3,69
NTP										
1	Fasilitas Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk	250.000.000	248.482.094	99,39	1	1	100,00	250.000.000	250.000.000	
2	Fasilitas Peningkatan Mutu Produk Olahan	450.000.000	439.492.500	97,67	3					

Lampiran 6. Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB)

 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA JALAN RAYA PALEMBANG – PANGKALAN BALAI KM. 29 KOTAK POS 1116 PALEMBANG 30001 TELEPON +628117553018, EMAIL: bptu@bptu.go.id, WEBSITE: www.bptu-sembawa.net</p>	
<p>SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT</p> <p>Nomor : 209 /SKLB/BPTU-HPT/11.2017</p>	
	
<p>IDENTIFIKASI TERNAK</p>	
Nomor	: 16.04.117
Jenis Kelamin	: Jantan
Bangsa	: BRAHMAN
Tgl. Lahir	: 17 Oktober 2016
No. Induk	: 2832/193
Bangsa Induk	: BRAHMAN
No. Bapak	: 40955
Bangsa Bapak	: Brahman (FRESH)
Umur (Hari)	0 205 3 Nov 2017
Berat Badan (Kg)	35 137 170
Panjang Badan (cm)	55 95 109
Tinggi Gumba (cm)	73 98 110
Lingkar Dada (cm)	70 111 115
<p>PEMILIK : BPTU - HPT SEMBAWA ALAMAT : Jl. Raya PLG - P. Balai Km.29 Kotak Pos 1116 Palembang 30001</p>	
<p>Catatan: Surat Keterangan ini tidak boleh hilang/rusak dan mengikuti setiap perpindahan ternak</p>	
 <p>Sembawa, 07 November 2017 Mugrono Budi Suprijatno NIP. 19600114 198912 1 001</p>	

Lampiran 7. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Tahun 2012-2017

No	Lapangan Usaha/Industrial Origin	Nilai Investasi (Rp. Juta)/Investment Value (million rupiah)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan <i>Agricultural, Forestry and Fishery</i>	9.888.201	6.953.375	13.379.943	13.112.834	21.671.029	22.947.124
a	Tanaman Pangan & Perkebunan <i>Food Crops & Plantation</i>	9.631.484	6.588.648	12.707.251	12.040.945	20.998.594	22.040.971
b	Peternakan <i>Livestock</i>	90.673	347.277	650.680	325.431	465.550	842.711
	Peternakan Sapi dan Kerbau <i>Livestock of Cattle and Buffaloes</i>	16.323	25.825	129.261	27.006	28.979	76.131
	Peternakan Domba dan Kambing <i>Livestock of Sheep and Goats</i>	-	-	-	-	-	-
	Peternakan Babi <i>Livestock of Pigs</i>	-	-	-	-	-	97.318
	Peternakan Unggas <i>Livestock of Poultry</i>	43.371	321.452	515.205	292.210	436.571	629.872
	Peternakan Lainnya <i>Other Livestocks</i>	30.979	0	6.214	6.214	0	39.391
c	Jasa Pertanian dan Perburuan <i>Agricultural Services and Hunting</i>	6.772	13.326	0	0	475	225
	Jasa Penunjang Pertanian <i>Support Activities for Agriculture</i>	478	13.326	0	0	475	0
	Jasa Penunjang Peternakan <i>Support Activities for Livestock</i>	-	-	-	-	-	0
	Jasa Pasca Panen <i>Post-Harvest Activities</i>	-	-	-	-	-	0
	Pemilihan Bibit Tanaman untuk Pengembangbiakan <i>Seed Processing for Propagation</i>	-	-	-	0	-	-
	Perburuan, Penangkapan dan Penangkaran Satwa Liar <i>Hunting, Trapping and Related Service Activities</i>	6.294	-	-	-	-	225
d	Kehutanan <i>Forestry</i>	144.542	50	313	471.809	203.839	30.144
e	Perikanan <i>Fishery</i>	14.729	4.074	21.699	274.649	2.571	33.072
2	Pertambangan <i>Mining</i>	10.480.900	18.762.176	3.140.693	3.946.832	6.033.624	20.635.055
3	Industri <i>Industry</i>	49.888.944	51.171.126	59.034.720	89.045.293	106.783.689	99.187.641
4	Listrik, Gas dan Air <i>Electricity, Gas & Water Supply</i>	3.796.780	25.831.293	36.296.775	21.946.835	22.794.516	25.427.474
5	Konstruksi <i>Construction</i>	4.586.618	6.033.176	12.097.634	17.165.449	14.039.124	30.334.308
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran <i>Trade, Hotel & Restaurants</i>	2.045.474	3.606.896	2.249.218	5.403.894	6.073.291	8.509.620
7	Transportasi, Gudang & Komunikasi <i>Transport, Storage & Communication</i>	8.612.042	13.178.417	15.714.999	21.333.871	26.769.567	34.473.483
8	Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran <i>Real Estate, Ind. Estate & Business Activities</i>	58.005	2.152.364	13.111.803	6.509.940	9.192.785	17.246.430
9	Jasa Lainnya <i>Other Services</i>	2.825.051	461.962	1.100.372	1.000.919	2.873.224	3.589.412
	Jumlah/Total	92.182.014	128.150.785	156.126.157	179.465.867	216.230.848	262.350.547

Lampiran 8. Data Unit Usaha yang sudah memiliki NKV

No	Provinsi	Jumlah Unit Usaha yang sudah memiliki NKV
1	Sumatera Utara	3
2	DKI Jakarta	21
3	Kep. Bangka Belitung	1
4	Kep. Riau	4
5	Jawa Tengah	21
6	DI Yogyakarta	4
7	Jawa Timur	51
8	Kalimantan Timur	9
9	Lampung	6
	Total	120

Lampiran 9. PDB Peternakan Tahun 2017

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2017**				
		I	II	III	IV	Jumlah
-1	-2	-33	-34	-35	-36	-37
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	306.493,7	332.186,8	346.539,8	271.674,0	1.256.894,3
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	236.712,4	260.367,6	273.111,8	198.146,4	968.338,2
	a. Tanaman Pangan	88.067,7	81.326,2	79.953,9	43.801,3	293.149,1
	b. Tanaman Hortikultura	30.307,8	36.740,6	37.253,1	30.519,3	134.820,8
	c. Tanaman Perkebunan	77.016,4	99.943,9	112.636,0	83.457,7	373.054,0
	d. Peternakan	36.578,4	37.497,3	38.065,8	36.331,6	148.473,1
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	4.742,1	4.859,6	5.203,0	4.036,5	18.841,2
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	14.019,8	15.929,8	15.592,0	15.735,6	61.277,2
	3 Perikanan	55.761,5	55.889,4	57.836,0	57.792,0	227.278,9

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 10. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) Tahun 2017

Sektor NTPT	NTPT (Nilai Tukar Petani Peternakan) Menurut Subsektor NTP 2017											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI	129.38	129.31	129.07	128.98	129.68	130.56	131.21	132.89	132.35	131.71	131.66	132.49
- Ternak Besar	131.70	131.96	131.89	132.08	132.57	133.63	134.61	136.73	135.96	135.35	135.30	135.74
- Ternak Kecil	124.74	124.56	123.81	123.23	122.99	123.60	124.28	126.36	125.80	124.90	124.57	124.58
- Unggas	128.65	127.82	127.82	127.54	129.31	130.79	130.30	131.17	130.85	129.75	129.58	131.24
- Hasil Ternak	123.32	122.77	122.31	121.64	122.75	122.79	123.62	123.85	124.08	123.77	123.69	125.78
INDEKS HARGA YANG DIBAYAR PETANI	121.42	121.70	121.60	121.57	122.19	122.38	122.49	122.52	122.51	122.50	122.85	123.58
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	132.33	132.92	132.75	132.38	133.37	133.60	133.77	133.56	133.20	133.01	133.53	134.93
a) Bahan Makanan	144.88	145.66	144.51	142.99	145.08	144.32	144.33	143.39	142.09	141.22	142.18	145.43
b) Makanan Jadi	129.48	130.06	130.49	130.81	131.27	131.67	132.01	132.25	132.37	132.63	132.90	133.26
c) Perumahan	124.09	124.64	125.68	126.13	126.62	128.56	128.71	128.93	129.19	129.57	129.85	130.17
d) Sandang	125.03	125.30	125.60	125.92	126.51	128.15	128.18	128.36	128.48	128.73	128.93	129.21
e) Kesehatan	120.80	121.24	121.71	122.07	122.45	122.88	123.20	123.53	123.79	123.99	124.35	124.66
f) Pendidikan, Rekreasi & Olah raga	116.36	116.56	116.66	116.76	116.95	117.54	118.11	118.45	118.59	118.70	118.79	118.85
g) Transportasi	121.21	121.72	121.66	122.03	121.92	122.27	122.44	122.68	122.95	123.12	123.39	123.48
- Indeks BPPBM	111.68	111.68	111.66	111.89	112.21	112.35	112.40	112.61	112.90	113.07	113.28	113.43
a) Bibit	112.32	111.92	111.93	112.08	112.55	112.90	112.59	112.92	113.27	112.99	113.31	113.35
b) Obat-obatan & Pupuk	110.58	110.44	110.14	110.47	110.78	110.89	110.99	111.22	111.51	111.96	112.11	112.30
c) Transportasi	109.95	110.42	110.97	111.13	111.69	111.96	112.35	112.55	112.99	113.14	113.44	113.66
d) Sewa Lahan, Pajak & Lainnya	121.27	121.61	121.68	121.79	121.76	121.91	122	122.09	122.19	122.25	122.45	122.49
e) Penambahan Barang Modal	110.07	110.44	110.60	110.71	111.02	111.14	111.20	111.31	111.64	111.76	111.83	111.92
f) Upah Buruh Tani	113.94	114.01	114.11	114.47	114.55	114.56	114.66	114.81	114.93	114.95	115.39	115.82
NILAI TUKAR PETANI PETERNAKAN	106.56	106.26	106.14	106.09	106.13	106.68	107.11	108.47	108.03	107.52	107.17	107.21
NILAI TUKAR USAHA PERTANIAN PETERNAKAN	115.85	115.78	115.60	115.27	115.57	116.20	116.73	118.01	117.23	116.49	116.22	116.81